

SKRIPSI

**JARINGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ECOTOURISM KAWASAN
KARST RAMMANG-RAMMANG DI KABUPATEN MAROS**

A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A

E011201060



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

THESIS
**POLICY NETWORK FOR ECOTOURISM DEVELOPMENT OF RAMMANG-
RAMMANG KARST AREA IN MAROS DISTRICT**

A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A

E011201060



PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE
HASANUDDIN UNIVERSITY
2024



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : A. Fauzan Sabir Siradj Munir A

NIM : E011201060

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 8 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006

**JARINGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ECOTOURISM KAWASAN
KARST RAMMANG-RAMMANG DI KABUPATEN MAROS**

**A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A
E011201060**

Skripsi

Telah dipertahankan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 19 Agustus
2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Makassar

Menyetujui
Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik,



Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP.196310151989031006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Alwi, M.Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Agustus 2024



A. Fauzan Sabir Siradi Munir A
E011201060

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan lancar dan skripsi ini dapat dirampungkan atas nikmat, ridho serta kehendak Allah SWT dan atas bimbingan, diskusi serta arahan **Prof. Dr. Alwi, M.Si** sebagai pembimbing, **Dr. Gita Susanti, M.Si** sebagai penguji 1 dan **Dr. Ishak Salim, M.A.** sebagai penguji 2. Terima kasih yang tak hingga saya haturkan kepada mereka yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Penghargaan tinggi saya sampaikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kab. Maros dalam hal ini Bidang Pariwisata Disparpora, Wakil Ketua Pansus Ranperda No 3 Tahun 2019, Pemerintah Desa Salenrang beserta BUMDES Appakabaji, BP Geopark Maros-Pangkep, POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang, Komunitas Anak Sungai, Mongabay.id, serta Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas kesempatan mengambil data untuk memperkaya hasil penelitian saya.

Kepada Badan Amil Zakat Nasional, saya mengucapkan terima kasih atas Beasiswa Cendekia Baznas selama menempuh program pendidikan sarjana. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pimpinan Universitas Hasanuddin, Dekan serta Wakil Dekan FISIP UNHAS; dan seluruh Dosen di Departemen Ilmu Administrasi Publik serta tenaga pendidik yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana dan rekan-rekan dalam tim penelitian.

Kepada kedua orang tua yang menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan studi, Bapak A. Amry Mattalitti dan Ibu Hastuty Mano yang keduanya dengan segenap jiwa serta raga memperjuangkan saya dalam menyelesaikan studi. Tak terhingga oleh kata cinta kasih itu, munajat di tiap sembah sujud akan menjadi persaksian bahwa surga dunia adalah kehadirannya. Tak lupa apresiasi yang besar saya sampaikan kepada saudara terkasih, Andi Faiz, Andi Fika dan Andi Farah atas motivasi dan dukungan yang tak ternilai.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu menaruh empati serta motivasi dalam setiap langkah kebaikan (Audi, Ahmad, Adi, Ade, Fariq, Rifqi), dan juga kepada (Ainun, Rifki, Rafli, Paje) serta kedua mentor saya selama di kampus (Kak Rizal dan Kak Adnan), yang sudah menjadi kawan berprogresif, bertukar pemikiran, ada di saat-saat saya susah dan duka serta banyak manfaat selama berproses saat menyandang status mahasiswa yang sebentar lagi saya akhiri melalui proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih untuk banyak wadah belajar (Teman Kerja FISIP UH, HUMANIS FISIP UH, SV PKKMB UH 2024, IMM KORKOM UNHAS, Kampus Gagasan, PENA 20) atas segala kesempatan yang menjadi wadah pengembangan bagi saya. Terima kasih untuk CSR Departement SCM dan Samudera Indonesia Makassar telah menerima saya dan banyak memberi input berharga untuk karir saya kedepan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik di FISIP UNHAS (Pak Jaya, Bu Ija, Pak Lili, Pak Andi Revi) dan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.

Kepada seseorang yang telah hadir dan yang hadir namun tak lagi kebersamai, terima kasih telah menjadi bagian dari proses penyempurnaan diri penulis yang telah memberi semangat, kebaikan, cinta kasih serta kesempatan. Serta semua pihak terlibat dan berkontribusi yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Dan tentu saja apresiasi setinggi-tingginya kepada diri sendiri.

“Hal Jazaa ul Ihsan illal Ihsan,” – 55:60.

Penulis
A. Fauzan Sabir Siradj Munir A

ABSTRAK

A. Fauzan Sabir Siradj Munir A. **Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros**

(Dibimbing oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana jaringan kebijakan pengembangan ecotourism kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun sumber data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Dimensi Jaringan Kebijakan Van Waarden (1992) yang terdiri dari 7 (tujuh) dimensi, yaitu Aktor (Actors), Fungsi (Function), Struktur (Structure), Pelembagaan (Institutionalisation), Aturan Main (Rule of Conduct), Hubungan Kekuasaan (Power Relation), dan Strategi Aktor (Actor Strategies). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) aktor yang terlibat dalam jumlah telah seimbang walau keterlibatannya masih belum optimal. (2) Fungsi jaringan kebijakan menunjukkan aktor memiliki peran masing-masing walau perlu pengoptimalan lebih lanjut. (3) Struktur jaringan tidak diartikan sebagai alur kerja dan mekanisme kerja belum jelas. (4) Pelembagaan pada jaringan tidak berjalan dengan optimal. (5) pola interaksi atau aturan main dalam jaringan bersifat konsultatif. (6) Distribusi kekuasaan masih bersifat sentralistik karena belum ada aturan yang jelas terkait distribusi yang harus dilakukan oleh aktor terkait. (7) Strategi yang dilakukan aktor telah optimal.

Kata Kunci: Jaringan Kebijakan, Pengembangan Ecotourism, Aktor, Rammang-Rammang.

ABSTRACT

A. Fauzan Sabir Siradj Munir A. **Policy Network for Ecotourism Development of Rammang-Rammang Karst Area in Maros District**
(Supervised by Prof. Dr. Alwi, M.Si)

This research aims to describe and analyze how the policy network for developing ecotourism in the Rammang-Rammang karst area in Maros Regency. This research method uses a qualitative approach with a case study research design. The data sources were obtained through observation, interviews and documentation. This research was analyzed using Van Waarden's Policy Network Dimension (1992) which consists of 7 (seven) dimensions, namely Actors, Function, Structure, Institutionalization, Rules of Conduct, Power Relations, and Actor Strategies. The results of this study indicate that (1) the actors involved in the number have been balanced even though their involvement is still not optimal. (2) The function of the policy network shows that actors have their respective roles even though further optimization is needed. (3) The network structure is not interpreted as a workflow and the work mechanism is not yet clear. (4) Institutionalization in the network is not running optimally. (5) interaction patterns or rules of the game in the network are consultative. (6) The distribution of power is still centralized because there are no clear rules regarding the distribution that must be carried out by related actors. (7) The strategies carried out by actors are optimal.

Keywords: *Policy Network, Ecotourism Development, Actors, Rammang-Rammang.*

DAFTAR ISI

Nomor Urut	Halaman
SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Teori.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II METODE PENELITIAN	16
2.1 Pendekatan Penelitian.....	16
2.2 Desain Penelitian.....	16
2.3 Prosedur Penelitian	16
2.3.1 Informan Penelitian.....	16
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	17
2.3.3 Teknik Analisis Data.....	18
2.4 Validitas dan Reliabilitas Data.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Aktor (<i>Actors</i>).....	20
3.2 Fungsi (<i>Function</i>).....	26
3.3 Struktur (<i>Structure</i>).....	39
3.4 Pelembagaan (<i>Institutionalization</i>).....	45
3.5 Aturan Bertindak (<i>Rule of Conduct</i>)	48
3.6 Hubungan Kekuasaan (<i>Power Relations</i>).....	54
3.7 Strategi Aktor (<i>Actor Strategies</i>).....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	58

4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....		60
LAMPIRAN		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pengunjung Rammang-Rammang	8
Tabel 2. 1	Informan Penelitian	17
Tabel 3. 1	Aktor pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.....	23
Tabel 3. 2	Fungsi Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang.....	32
Tabel 3. 3	Struktur Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang.....	43
Tabel 3. 4	Pelembagaan Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir	13
Gambar 3. 1 Data Pengunjung dan Retribusi Ekowisata Rammang-Rammang	35
Gambar 3. 2 Data Retribusi Ekowisata Rammang-Rammang.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi pada perspektif administrasi publik memberikan banyak jawaban atas persoalan yang semakin kompleks pada problematika publik. Tata kelola negara yang efektif menjadi salah satu kunci penyelesaian perkembangan masalah-masalah tersebut dimana implementasinya tidak hanya menjadikan pemerintah sebagai aktor utama melainkan mengutamakan jaringan bersama pada kesuksesan visi publik yang dirumuskan secara kolektif. Perspektif seperti ini menghendaki pemerintah bukan lagi sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan publik (Alwi, 2018).

Pada praktiknya, kebijakan pemerintah harus memastikan terkait kerjasama dari berbagai kalangan dan aktor untuk dilibatkan pada implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tersebut. Sederhananya, diharapkan pemerintah bisa membentuk jaringan kolaborasi dengan para aktor dalam keberhasilan visi dari sebuah kebijakan. Pada aksi solutif dari seluruh problematika yang sangat rumit karena unsur politis yang sarat keperluannya masing-masing di pandangan kebijakan publik, perspektif administrasi publik sendiri mengenal aksi solutif tersebut dengan sebutan jaringan kebijakan (Sopia Rukmana et al., 2020).

Pada perkembangannya, muncul berbagai gerakan perubahan yang didasari oleh semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga memicu transformasi pada perspektif tata kelola negara. Peristiwa pergantian paradigma ini dimulai dengan perumusan serta penerapan pada metode yang digunakan khususnya pada konsep *government ke governance*. Paradigma *governance* sendiri tidak serta merta hadir untuk mengatur tata kelola pemerintahan khususnya pada kewenangan dan kekuasaan tetapi relasi kerjasama dan keterlibatan pada aktor-aktor diluar lingkup pemerintah. Secara singkat, bagaimana pemerintah sukses menjadi wadah serta katalisator untuk mencipta kebijakan dan regulasi semacamnya (A. R. Hidayat et al., 2015).

Berbagai kajian yang dikembangkan dari perspektif *governance* memberikan solusi terhadap realitas implementasi kebijakan publik saat ini yang memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dari berbagai organisasi publik dan swasta. Salah satu kajian tersebut adalah penelitian jaringan yang disebut dengan konsep jaringan kebijakan ketika mempertimbangkan fenomena publik, yang saat ini sedang dikembangkan untuk mencapai tujuan politik yang kompleks. Fenomena ini erat kaitannya dengan proses kebijakan pemerintah saat ini yang cenderung melibatkan banyak aktor, baik pemerintah maupun swasta. Alasan utamanya adalah bahwa isu-isu publik saat ini menjadi semakin kompleks dan merupakan hal yang mendesak dan penting untuk mengadaptasi pendekatan-pendekatan-pendekatan baru untuk menghadapi kompleksitas dan keragaman aktor yang terlibat dalam proses kebijakan tertentu (Kasmadsi & Alwi, 2015).

Dari sekian banyak tujuan kebijakan publik disebutkan bahwa kebijakan publik lahir untuk mengatasi masalah publik, yang mana masalah ini pada umumnya merupakan *wicked problem* sehingga memerlukan kolaborasi antar para pemangku kepentingan untuk mengatasinya. Mereka perlu terlibat secara kolektif dan serius untuk mendiskusikan ruang lingkup masalah serta alternatif solusinya (Alwi, 2018). Karena *wicked problem* merupakan problematika yang berada pada titik diferensial karena belum atau tidak terdefinisikan dengan jelas serta selalu diperdebatkan, penyelesaian masalah tidak cukup dengan melakukan penyelidikan dan eksperimen semata tapi harus dengan kolaborasi para aktor serta pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan dan kebijakan publik pasti akan dihadapkan dengan berbagai problematika sehingga kinerja implementasi suatu kebijakan akan rumit diselesaikan. Ada masalah yang mungkin bisa diselesaikan dengan efektif dan ada juga masalah yang memerlukan proses analisis panjang serta diskusi yang alot untuk menemukan titik temu, namun tak cukup sampai disitu ternyata ada juga masalah yang sangat sulit ditemukan jalan keluarnya walaupun dengan menggunakan alat analisis yang canggih. Masalah tersebut dalam kebijakan publik disebut "*wicked problem*" (Alwi, 2022).

"*The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous ways,*" atau penentuan masalah serta solusi yang ditawarkan tidak mencapai kesepakatan di antara pemangku kepentingan. Para aktor memiliki pandangan berbeda dalam menentukan hal maupun kepentingan yang dimiliki sehingga variasi dari metode dan cara menentukan masalah serta solusi sangat majemuk merupakan salah satu karakteristik *wicked problem* yang menjadi bahan perbincangan serius di ranah kebijakan publik khususnya pada hal-hal yang memiliki relasi kuasa pada kepentingan berbagai aktor (Alwi, 2022). Apalagi pada karakteristik ini jika ditemukan pada kondisi sosial-kultural yang saling resisten, akan sangat sulit dipecahkan bahkan perlu kiat luar biasa untuk mendudukkan perkaranya.

Problematika tersebut secara kolektif menjadi sebuah komponen strategis dalam kajian governance jika dihubungkan pada bagaimana kondisi latar belakang yang terjadi di suatu tempat yang memiliki berbagai unsur-unsur politik ekonomi terkait capaian-capaian aktor, struktur hingga dinding yang saling membatasi satu sama lain. Secara komprehensif muncul sebuah pertanyaan, apakah sebuah kelompok masyarakat sebagai aktor kebijakan bisa menggantikan *positioning* pemerintah sebagai *stakeholder* kebijakan dalam mengelola suatu sumberdaya secara jangka panjang? Apakah latar belakang dari tempat tersebut mempengaruhi, baik secara historis maupun pranata yang berlaku? Bagaimana relasi kuasa antara satu aktor dan aktor lainnya dengan kepentingan yang mungkin saja berbeda? Ternyata dalam karakteristik relasi kuasa antar aktor tersebut didefinisikan secara tersirat untuk mengisyaratkan bahwa kompleksitas masalah pada jaringan para aktor tersebut karena hadirnya beberapa unsur berupa hadirnya ketimpangan antarpihak/*actor*, tidak bersifat biner sehingga condong ke multiaktor, sifatnya dinamis oleh aktor-aktor yang terlibat serta ada dominasi yang tak terduga (Sirimorok et al., 2023).

Jaringan kebijakan kemudian diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang kompleks. Jaringan kebijakan ini tidak cocok jika sekedar menjadikan khalayak sasaran sebagai objek kebijakan, namun perlu menjadikan khalayak sasaran sebagai subjek dari proses perumusan kebijakan. Teori jaringan dapat digunakan pada berbagai tingkat aktivitas, seperti perumusan dan implementasi kebijakan serta pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia secara umum (*resource sharing*). Berbagi sumber daya hanya mungkin dilakukan dalam organisasi berbasis jaringan. Sifat jaringan ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya dalam proses perumusan kebijakan (Dwiyanto, 2008)

(E.-H. Klijn et al., 2000) berpendapat bahwa pendekatan jaringan menyajikan kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara banyak pelaku organisasi yang tiap organisasi bergantung pada organisasi lain untuk sumber daya dalam bertahan dan mencapai tujuannya. Saat aktor berhubungan, proses perbandingan sumber daya muncul dan aturan berkembang yang mengatur jalinan interaksi sampai batas tertentu mengisolasi jaringan dari dunia luar. Ini memunculkan aksi-reaksi terhadap kepentingan para aktor yang terlibat pada sebuah perumusan kebijakan hingga sampai pada implementasinya. Dalam pandangan lain, (H. E. Klijn & Koppenjan, 2016) memaparkan bahwa sebuah kebijakan direpresentasikan pada perilaku aktor kebijakan, misalnya seorang tokoh, kelompok atau lembaga pemerintah dalam suatu aktivitas politik. Interaksi dalam proses pembuatan kebijakan seringkali menghadapi permasalahan kompleks karena dalam prosesnya dinamika yang berkembang sulit untuk diprediksi serta beragamnya perspektif para aktor yang ada dalam proses tersebut dalam lingkungan yang multi aktor dan multi sektor.

Di Indonesia, pergerakan paradigma ditandai dengan sistem desentralisasi semakin umum terlihat. Sistem desentralisasi atau dikenali sebagai sistem otonomi daerah yang memberikan kekuasaan penuh terhadap pemerintah daerah untuk menata dan merumuskan sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini semakin diperkuat dengan regulasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi konsentrasi salah satunya adalah pengaturan di fokus pariwisata tentang pengembangan potensi desa wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Perspektif jaringan kebijakan publik (*policy network*) menjadi pendekatan yang relatif baru dalam diskursus kebijakan publik jika dibandingkan dengan beberapa atau pendekatan yang umum digunakan dalam formulasi bahkan pada tahapan implementasi kebijakan. Perspektif jaringan sendiri hadir dan dikembangkan sebagai strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks (Moran et al., 2006)

Pada beberapa waktu terakhir, negara-negara yang notabene berkembang mulai menjalankan sebuah keputusan serta alternatif dalam mengimplementasikan desentralisasi pada pengelolaan sumberdaya alam (Larson & Soto, 2008). Salah satu bentuk implementasi desentralisasi tersebut di antaranya tergambarkan dalam keadaan masyarakat sebagai aktor inisiasi pada pengelolaan sumberdaya alam dan

secara kontemporer marak dirumuskan ke dalam regulasi dan perencanaan pembangunan utamanya pada desa dan upaya melestarikan alam (Saunders, 2014). Desentralisasi yang tercipta ini merupakan kiat membangun jaringan pengelolaan sumberdaya secara bersama-sama dengan seluruh aktor yang terlibat dengan tupoksinya masing-masing sehingga menciptakan perlindungan dari rusaknya sumberdaya yang dimanfaatkan. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kondisi iklim setempat (Diaz et al., 2022).

Ketika melihat bagaimana potensi negara dalam mendukung praktik sosial oleh sekelompok warga dalam memanfaatkan sumberdaya yang lebih adil dan berkelanjutan, tentu akan hadir pula ketimpangan yang terjadi karena relasi kuasa antarpihak dengan berbagai kepentingannya. Namun, yang menjadikannya sebagai kajian menarik adalah di tengah maraknya kegagalan terhadap implementasi dalam struktur jaringan kebijakan tersebut, ada sekelompok warga berhasil mendirikan sistem pengelolaan bersama walau di tengah latar yang kontradiktif dan hanya sebagian kecil kelompok dalam jangka panjang bisa melakukannya. Kondisi ini didorong karena didasari karena berbagai faktor namun biasanya mempunyai substansi yang sama pada kasus serupa di tempat yang berbeda. Perwujudan tersebut akhirnya melahirkan serangkaian aturan yang terbagi secara sosial melalui lisan dan biasanya tidak dituliskan yang dikomunikasikan serta dijalankan di luar ruang-ruang formal, ini kerap kali dikenali sebagai kesepakatan masyarakat secara informal atau pranata informal (Helmke & Levitsky, 2006)

Di kabupaten Maros tepatnya di desa Salenrang, untuk memperkuat klaim pada ruang Rammang-Rammang dan kawasan karst demi kelestariannya tetap terjaga khususnya dari perusakan akibat industri ekstraktif tambang, masyarakat kemudian mengkonsolidasikan hingga menginisiasi terciptanya sebuah regulasi dan konsep tanding terkait pemanfaatan sumberdaya yang lebih ramah lingkungan serta berhasil menciptakan alternatif ekonomi baru yang menggantikan aktivitas tambang. Adanya gerakan masyarakat yang masif sebagai aktor utama dalam menyusun konsep tanding guna melawan aktivitas ekstraktif tersebut kemudian melahirkan perhatian terhadap publik secara luas dengan pertanyaan yang amat mendasar, apakah konsep yang ditawarkan sebagai tandingan bisa di adaptasi dengan baik oleh masyarakat dengan 2 (dua) indikator utama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam atau justru sebaliknya. Diangkatnya sektor pariwisata sebagai konsep tanding bukan tanpa diskusi dan pertimbangan matang walaupun konsep antitesis industri ekstraktif ini bukan satu-satunya alternatif. Akhirnya demi terjalannya konsep tanding tersebut, pada tahun 2015 membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan mendorong lahirnya Peraturan Desa dan SK Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Maros terkait pengelolaan wisata di Rammang-Rammang dengan harapan bisa melenyapkan potensi lahirnya kembali izin tambang.

Setelah melalui dinamika yang panjang, disadari ternyata pada implementasinya peraturan desa terkait pengelolaan wisata saja tidak cukup untuk menjaga potensi tambang tidak kembali muncul pada ruang Rammang-rammang.

Keberadaan Perda yang khusus mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial seperti karst diperlukan demi mencegah problematika selain ketakutan atas tambang yaitu konflik benturan antara masyarakat ke masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur secara umum pada tingkat pusat, Muhammad Ikhwan atau Iwan Dento sapaan akrabnya berpendapat bahwa hadirnya Perda ini sangat penting bagi warga Salenrang yang bermukim di sekitar kawasan karst khususnya bagi keberlangsungan industri pariwisata yang menjadi sumber pencaharian mereka. Pada tahun 2019, setelah proses yang sangat panjang melalui berbagai pihak dan aktor, lahirlah Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep. Perda ini diharapkan dapat melindungi kawasan dari dampak eksploitasi berlebihan baik dari perusahaan ataupun masyarakat sendiri (Hajramurni et al., 2022). Jika ditinjau pada proses terciptanya kedua regulasi tersebut, adanya pelibatan aktor yang beragam karena sadar terhadap keterbatasan masing-masing baik secara sumberdaya maupun *power resources* lainnya menjadikan proses ini sangat kompleks. Jika ditinjau pada pengoptimalan terhadap konsep *ecotourism* sebagai implementasi dari regulasi yang telah dirumuskan sebelumnya, masyarakat di Rammang-rammang secara aplikatif menjalankan konsep tersebut dengan basis masyarakat sebagai aktor utama atau *Community Based Tourism*. Walau demikian, hadirnya konflik pada relasi kuasa atas hak pengelolaan terhadap sumberdaya yang sangat kaya di Rammang-rammang ini kemudian masih menjadi persoalan serius yang perlu dipecahkan masalahnya. Adanya fenomena disharmonis relasi antara pemerintah setempat dan masyarakat menjadi poin utama untuk diteliti secara lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Berdasarkan fenomena tersebut, teori jaringan kebijakan dianggap efektif untuk diaplikasikan dalam menjelaskan apa yang terjadi dalam pengoptimalan kebijakan *ecotourism* pada kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros.

Kawasan *ecotourism* Rammang-Rammang merupakan salah satu destinasi wisata yang paling dikenal di Sulawesi Selatan beberapa waktu terakhir yang berada dalam cakupan Desa Salenrang, Kabupaten Maros. Diferensiasi yang menjadikan Rammang-Rammang unik ketimbang destinasi wisata lainnya yang dibangun oleh pemerintah dan swasta adalah bagaimana inisiasi, jejak historis serta pengelolaan yang secara keseluruhan dimiliki oleh masyarakat setempat melalui Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata. Hal ini tercipta sebagai aktualisasi aksi resisten terhadap industri ekstraksi tambang di kawasan tersebut. Pada perkembangannya, pariwisata di kawasan Rammang-Rammang memberikan efek ekonomi yang sangat signifikan. Mata pencaharian masyarakat yang dulunya hanya bergantung pada hasil perkebunan, batu gamping maupun mengumpulkan kotoran kelelawar yang diolah sebagai pupuk, sekarang telah memiliki opsi baru pada ekosistem pariwisata berupa jasa perahu, penginapan, restoran dan café serta lahan yang dijadikan sebagai tempat parkir. Alhasil, setidaknya ada 282 keluarga dari 500 keluarga di desa Salenrang yang terbantu secara ekonomi sejak konsep *ecotourism* ini hadir (Rahman, 2022).

Ecotourism sendiri secara definisi menurut (Satria, 2009) merupakan suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Pada konsep *ecotourism* ada beberapa fungsi yang menjadi titik berat pada pelaksanaannya yaitu keberlangsungan alam atau aspek ekologi, peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat dan psikologi adaptif pada kehidupan sosial budaya Masyarakat. Sementara, jika ditinjau pada aspek lainnya khususnya pada segi tata kelola, *ecotourism* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan pandangan kultural setempat.

Konsep *ecotourism* memiliki peran yang penting melihat Indonesia dengan potensi keindahan alam dan kekayaan budaya yang sangat beragam serta bernilai tinggi dalam industri pariwisata. Potensi alam ini berupa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman flora, fauna dan fenomena alam dengan keindahan lanskap yang masih terjaga kelestariannya. Urgensi pada konsep *ecotourism* dalam pengembangan potensi lokal wilayah pariwisata menjadi sangat penting dikarenakan mampu meningkatkan nilai jual pada berbagai sektor khususnya pada ekonomi rakyat dan pelestarian lingkungan yang rentan untuk rusak apabila tidak dilindungi. Hal ini juga memiliki urgensi yang besar khususnya pada potensi karst (Dewi et al., 2021).

Indonesia sendiri memiliki potensi bentang alam karst seluas 154.000 km² atau 0,08% dari luas keseluruhan daratan Indonesia. Sulawesi Selatan sangat beruntung karena memiliki kawasan karst yang tersebar pada kabupatennya. Salah satu yang paling terkenal dan diakui oleh dunia adalah kawasan karst Maros-Pangkep (KKMP) yang merupakan kawasan karst terbesar dan terindah kedua di dunia setelah kawasan karst di China Selatan. Kawasan Desa Wisata Rammang-Rammang yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi salah satu destinasi pariwisata karst yang marak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Ikhsan, 2021)

Dengan berbagai faktor tersebut, pengembangan pariwisata pada Kawasan Rammang-rammang bukanlah sesuatu hal yang baru, berbagai usaha peningkatan baik sarana maupun prasarana pariwisata terus diluncurkan. (Nugroho & Yusuf, 2013), menjabarkan bahwa di era globalisasi ini, sektor pariwisata mulai beralih pada konservasi dan upaya pelestarian lingkungan yang dikenal dengan konsep *ecotourism*. *Ecotourism* menjadi salah satu alternatif pengembangan potensi lokal yang diharapkan memberikan dampak yang lebih komprehensif serta meningkatkan pembangunan yang bersifat berkelanjutan pada dua objek utama yaitu masyarakat lokal/*local communities dan lingkungan (environment)*.

Konsep *ecotourism* sendiri lahir sebagai bentuk kontribusi dalam aksi pelestarian lingkungan yang dinilai sangat tinggi. Sederhananya, konsep *ecotourism* banyak diadopsi oleh negara dengan perspektif melestarikan sumber daya alam

melalui segala cara yang dapat dilakukan. *Ecotourism* dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui ekonomi kerakyatan serta menjaga lingkungan alam serta warisan budaya dengan menciptakan kesadaran bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya (Wuleka Kuuder & Kuuder, 2012).

Pada kawasan karst Rammang-Rammang tepatnya di Desa Salenrang yang menjadi pusat kegiatan *ecotourism* sendiri dimulai pada tahun 2015 oleh warga setempat, Muhammad Ikhwan atau akrab disapa *Iwan Dento* bersama dengan rekan-rekannya membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selama 2 (dua) tahun setelah pembentukan Pokdarwis walaupun tidak memiliki waktu yang banyak untuk melihat referensi dan percontohan pengelolaan, akhirnya pelan tapi pasti titik terang dari pengelolaan objek wisata karst Rammang-Rammang mulai terlihat. Bersama Pokdarwis dan masyarakat akhirnya menyepakati pengelolaan pariwisata berbasis *ecotourism* yang mengedepankan konservasi dan pemberdayaan masyarakat baik dalam menjaga lingkungan maupun dalam peningkatan ekonomi.

Selain peningkatan ekonomi, *ecotourism* menutup celah peluang industri ekstraktif pada kawasan karst, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kawasan wisata menjadi urgensi utama pada pelaksanaan konsep *ecotourism* yang dilakukan di Rammang-Rammang. Nilai *ecotourism* yang dihitung berdasarkan kesediaan pengunjung untuk membayar pada barang dan jasa di Rammang-Rammang sebesar Rp. 70.473.674.052,12,- atau US\$.5.427.314,14 per tahun dengan nilai surplus konsumen sebesar Rp. 19.046.303.438. Surplus konsumen ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata dengan pemberlakuan konsep *ecotourism* karena terjadi atraksi ataupun suguhan yang unik di pariwisata tersebut. Dengan angka yang sangat fantastis ini, masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sebagai *local communities* dan aktor utama pada pengelolaan wisata (Made et al., 2017).

Walau demikian, meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena pengunjung Rammang-Rammang yang kian bertambah dengan daya beli signifikan pada barang dan jasa yang ditawarkan pengelola, ancaman kerusakan atau penurunan kualitas objek wisata juga menjadi indikator yang tak kalah pentingnya dalam pelestarian kawasan wisata tersebut. Perlunya edukasi kepada seluruh aktor baik pengelola, pengunjung dan pemerintah tentang pentingnya menjaga kawasan tersebut dari kerusakan ekosistem melalui regulasi serta sistem kelola yang inklusif merupakan tanggung jawab bersama. Adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Salenrang dan pranata lokal yang berlaku di masyarakat khususnya dalam menjaga aliran sungai serta lingkungan di sekitar lokasi wisata menjadi unsur penting pada pelestarian dan terjaganya kawasan Karst Rammang-Rammang (Putra et al., 2023).

Dalam peningkatan potensi *ecotourism*, seyogyanya pemerintah serta *stakeholder* lainnya turut andil dalam memperhatikan sarana dan prasarana serta infrastruktur guna meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung sehingga mampu mempercepat kebangkitan pariwisata serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Secara khusus berikut merupakan jumlah pengunjung selama periode 5 tahun pada kawasan wisata karst Rammang-rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Rammang-Rammang

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	72.308
2019	50.690
2020	23.215
2021	31.221
2022	52.570

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kab. Maros, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditinjau bahwa jumlah pengunjung begitu fluktuatif serta mengalami penurunan pada masa pandemi per-tahun 2020, namun mengalami peningkatan jumlah pengunjung seiring lepasnya status Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jumlah pengunjung sangat tidak menentu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi faktor cuaca, hal tersebut dikarenakan akses menuju kawasan karst tersebut harus ditempuh melalui perjalanan penyebrangan perahu, sehingga terdapat berbagai kendala yang dihadapi meliputi penurunan debit air sungai saat musim kemarau serta peluapan debit air ketika musim hujan. Hal tersebut menjadi sebuah hal yang patut ditinjau, melihat peran pemerintah masih begitu minim dalam memenuhi standar serta kualitas penyediaan fasilitas pada kawasan wisata Rammang-rammang. Selain itu, adanya perbedaan konsep pada tataran aktor pada perumusan dan implementasi kebijakan pada Kawasan Karst Rammang-Rammang menjadi penyebab potensi penyalahgunaan wewenang serta kewajiban para aktor untuk menjaga kelestarian alam dan sejalan pada pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Studi tentang jaringan kebijakan yang dilakukan (R. A. Hidayat et al., 2015), dengan judul “Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba)” mengungkapkan bahwa perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa Kajang di kabupaten Bulukumba tidak menunjukkan proses pemberdayaan dimana dalam konsep pemberdayaan target kelompok kebijakan bukan hanya dipandang sebagai objek dari kebijakan yang dirumuskan, melainkan lebih kepada subjek atau pelaku yang juga berperan secara aktif dalam perumusan kebijakan.

Selanjutnya, penelitian (Hartina et al., 2020), dengan judul “*Trust in the Network of Food Diversification Policy Implementation in Bone Regency*” mengungkapkan bahwa interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Kabupaten Bone belum menunjukkan adanya *trust*. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kepercayaan terhadap niat baik yang ditunjukkan dengan adanya kesediaan untuk menghadiri pertemuan antara KWT dan penyuluh

dalam hal pendampingan. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan program bersama untuk meningkatkan kinerja kebijakan, kepercayaan terhadap kesepakatan kontrak tidak terwujud karena tidak ada aturan main yang disepakati bersama dalam implementasi kebijakan oleh para aktor dan yang terakhir tidak ada peluang yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas kesepakatan bersama diantara para aktor sehingga sukar teridentifikasi perilaku menyimpang dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan ini.

(Alwi & Kasmad, 2014), dalam penelitiannya "*Bureaucratic System Vs People Empowerment Policy: Empirical Evidence From Cocoa Farmer Empowerment Policy In South Sulawesi Province, Indonesia*" mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan petani kakao di provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan mekanisme birokrasi yang cenderung kaku dan *rule oriented* sehingga program kebijakannya masih tergolong proyek birokrasi dan bukan berorientasi pemberdayaan murni.

Dari segi empirik, penelitian ini penting untuk memberi gambaran secara terukur pada konteks multiaktor di kawasan karst Rammang-Rammang khususnya dalam mengoptimalkan konsep *ecotourism* dalam mencapai 2 (dua) indikator utama yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya ekosistem lingkungan (ekologis) pada kawasan tersebut. Munculnya berbagai problematika sosial dan konflik relasi kuasa erat kaitannya dengan lemahnya *stakeholder* utama yaitu pemerintah dan kelompok masyarakat dalam memahami serta mempertemukan hak dan kewajiban yang telah disepakati serta dilimpahkan kepada masing-masing aktor. Berbagai masalah yang timbul ini memberikan hipotesis bahwa ada konflik kepentingan khususnya yang dibawa oleh pemerintah setempat untuk pribadi dan komunitas tertentu sementara pengetahuan masyarakat dalam mengetahui hak-haknya sebagai warga negara meningkat.

Diferensiasi tersebut menjadi acuan penulis untuk merumuskan formulasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul selama penelitian berlangsung.

1.2 Landasan Teori

Studi kebijakan beberapa waktu terakhir menjadi konsep yang marak diperbincangkan berbagai pihak mulai dari aparat, lembaga negara, swasta hingga masyarakat umum. Dalam kajian politik, jaringan kerap dikonotasikan oleh pegiat politik maupun peneliti dalam memaparkan urgensi terhadap presensi pemangku kepentingan dari latar belakang masing-masing untuk mendiskusikan serta mengambil keputusan sehingga melahirkan kebijakan publik. Teori jaringan merupakan salah satu perspektif administrasi publik yang memberi konsentrasi terhadap perhatian kepada struktur terkecil hingga terbesar. Perspektif ini menjelaskan bahwa dalam teori jaringan, aktor dapat diidentifikasi sebagai sebuah individu, kelompok, korporasi dan masyarakat. Adanya konektivitas bisa pada semua tingkatan baik di tingkatan struktur sosial secara makro maupun mikro. Pada teori jaringan sendiri, karakteristik kunci pada studinya adalah bagaimana proses analisa

yang dijalankan diupayakan terarah pada pengetahuan terhadap relasi di kalangan dan antar aktor yang tidak terikat secara yuridis serta tak melengkapi persyaratan pemenuhan dalam kelompok (Wellman, 1985 dalam Ritzer, 2004)

Pada dasarnya terdapat berbagai teori dalam jaringan kebijakan. Misalnya teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh (DeLeon & Varda, 2009) yang membagi ke dalam tujuh dimensi yaitu Representasi/Keanekaragaman, *Reciprocity*/hubungan timbal balik, *Horizontal Power Structure*/Kekuatan Struktur Horizontal, *Embeddedness*/Keterikatan, *Trust and Formality*/Kepercayaan dan Formalitas, *Participatory Decision Making*/Pengambilan Keputusan Partisipatif, *Collaborative Leadership*/Kepemimpinan Kolaboratif. Selain itu, teori jaringan implementasi juga dikemukakan oleh (DeSeve, 2007) yang berfokus mengenai manajemen keberhasilan dalam kolaborasi yang terdiri dari struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar partisipan, akses terhadap kekuasaan.

Dalam studi jaringan kebijakan, (Van Waarden, 1992) menformulasikan teori proses perumusan kebijakan berbasis jaringan dengan menyebutkan dimensi penting pada jaringan kebijakan. Selain pada proses perumusan kebijakan, pandangan tersebut digunakan pada implementasi kebijakan. Jika ditinjau pada penggunaannya, teori ini dapat menggambarkan bagaimana fenomena-fenomena yang kompleks dalam proses perumusan kebijakan hingga implementasi kebijakan yang telah dirumuskan sehingga menjadi acuan bagi organisasi berbasis jaringan dalam rangka merumuskan sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi utama jaringan kebijakan yaitu: (1) *actors* (aktor), (2) *function* (fungsi), (3) *structure* (struktur), (4) *institutionalization* (pelembagaan), (5) *rules of conduct* (aturan bertindak), (6) *power relations* (hubungan kekuasaan), dan (7) *actor strategies* (pihak strategis). Untuk mendalami konsep jaringan kebijakan, berikut penjelasan masing-masing dimensi jaringan kebijakan oleh Waarden :

1. *Actors* (aktor)

Aktor merupakan jumlah partisipan dalam pengambilan keputusan. Jumlah partisipan akan menentukan ukuran jaringan. Semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin besar pula jaringan tersebut, demikian sebaliknya. Pelaku dalam jaringan dapat berupa individu maupun organisasi. Karakteristik jaringan sangat dipengaruhi oleh jenis aktor yang terlibat. Hal ini berarti bahwa kebutuhan dan kepentingan aktor menjadi dasar saling ketergantungan. Adapun properti aktor yang relevan adalah struktur, kapasitas, sumber daya dan kinerja organisasi pemerintah dan masyarakat, tingkat profesionalisasi yaitu pola pelatihan dan rekrutmen perwakilan organisasi seperti negara dan mandat mereka, konsepsi peran dan sikap.

2. *Function* (fungsi)

Jaringan sebagai saluran komunikasi dapat melakukan berbagai fungsi sendiri atau secara bersamaan. Fungsi ini bergantung pada kebutuhan, niat, sumber daya dan strategi para aktor yang terlibat. Sebagaimana diketahui

bahwa struktur jaringan tidak memiliki tujuannya sendiri. Konsep fungsi dalam hal ini menjadi jembatan antara 'struktur' dan 'aktor' dalam jaringan. Fungsi utama jaringan kebijakan adalah untuk meningkatkan intensitas hubungan para anggota jaringan, yaitu:

- a. Saluran akses terhadap proses pengambilan keputusan
- b. Konsultasi, atau pertukaran informasi
- c. Negosiasi, yaitu pertukaran sumber daya dan/atau kinerja atau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, mobilisasi sumber daya
- d. Koordinasi tindakan independen
- e. Kerjasama dalam formulasi, implementasi, dan legitimasi kebijakan

3. *Structure* (struktur)

Struktur jaringan kebijakan mengacu pada pola hubungan antar aktor. Beberapa variabel penting dalam struktur ini adalah:

- a. Ukuran/besaran jaringan ditentukan oleh jumlah aktor
- b. Batas-batas yang mungkin terbuka dan lancar, atau tertutup dan monopolistik
- c. Jenis keanggotaan: partisipasi sukarela atau wajib. Hal ini menentukan apakah para pelaku memandang jaringan sebagai sebuah masalah atau peluang
- d. Pola hubungan: kacau atau teratur
- e. Intensitas atau kekuatan hubungan, yaitu frekuensi dan durasi interaksi
- f. Kepadatan dan multipleksitas yakni sejauh mana para aktor dihubungkan oleh banyak relasi
- g. Simetri atau timbal balik dari interkoneksi
- h. Pengelompokan atau diferensiasi dalam subjaringan
- i. Pola atau jenis koordinasi yang menghubungkan: wewenang hierarkis, konsultasi dan tawar-menawar horizontal, keanggotaan yang tumpang tindih, kepemimpinan yang saling terkait, mobilitas personel yang sering dari satu organisasi ke organisasi lainnya
- j. Sentralitas: tidak ada plurisentris (komunitas bersama), atau unit pusat yaitu organisasi utama sebagai pemerakarsa kebijakan
- k. Tingkat pendelegasian kompetensi pengambilan keputusan ke unit pusat dan pengendalian oleh peserta jaringan
- l. Sifat hubungan: konflikual, kompetitif atau kooperatif
- m. Stabilitas

4. *Institutionalization* (Pelebagaan)

Institusionalisasi mengacu pada karakter struktur jaringan formal dan stabilitasnya. Ini berarti bahwa tingkat pelebagaan akan bergantung pada karakteristik struktural jaringan. Pelebagaan akan cenderung lebih besar dalam jaringan tertutup dengan keanggotaan wajib, hubungan yang teratur, intensitas tinggi, multipleksitas dan simetri hubungan, keanggotaan yang

tumpeng tindih dan kepemimpinan yang saling terkait, dan dengan unit kebijakan pusat.

5. *Rule of Conduct* (Aturan bertindak)

Aturan perilaku disebut juga konvensi interaksi/aturan main merupakan salah satu dimensi jaringan kebijakan yang mengatur pertukaran dalam jaringan. Hal ini berasal dari persepsi peran, sikap, minat, latar belakang sosial dan pendidikan intelektual para aktor yang berpartisipasi dan kemungkinan besar pada gilirannya akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Jaringan yang sangat terinstitusionalisasi juga dapat mengembangkan 'budaya' dan konvensi mereka sendiri seperti halnya yang dilakukan organisasi.

6. *Power relations* (Hubungan kekuasaan)

Hubungan kekuasaan merupakan salah satu karakteristik utama jaringan kebijakan. Hal ini ditandai dengan adanya distribusi kekuasaan yang mana merupakan fungsi dari distribusi sumber daya dan kebutuhan di antara para aktor dan struktur organisasi bersama mereka ketika mereka membentuk organisasi.

7. *Actor strategies* (Strategi aktor)

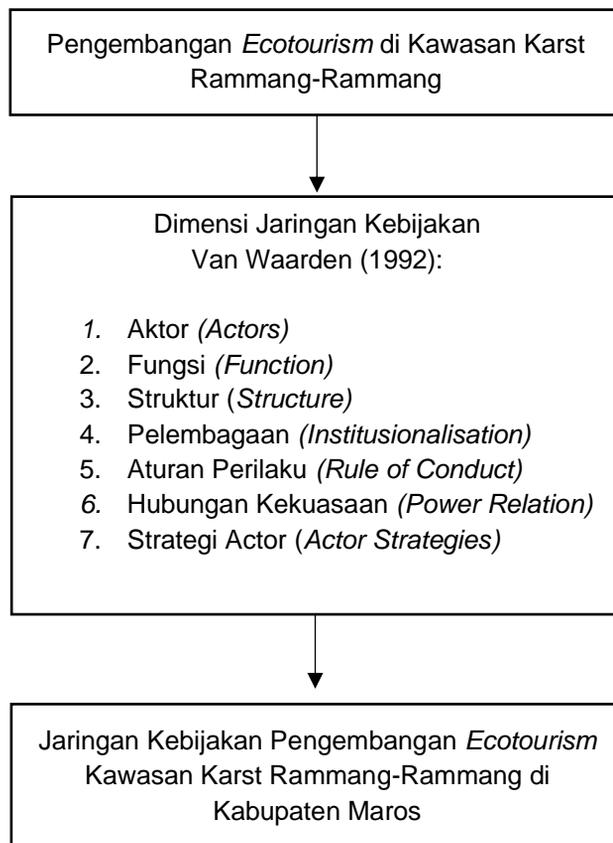
Strategi aktor berkaitan dengan bagaimana para aktor menciptakan dan/atau menggunakan jaringan dalam rangka memenuhi kebutuhan, kepentingan dan tujuan mereka, dan mengembangkan strategi untuk mengelola saling ketergantungan mereka.

Peneliti menggunakan teori ini karena dianggap relevan untuk bisa menganalisis secara menyeluruh terkait permasalahan yang ada pada jaringan kebijakan publik di kawasan karst Rammang-Rammang dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks atau '*wicked problem*' dengan dasar yang dikemukakan oleh (Alwi, 2022) dalam bukunya "*The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous ways,*" atau penentuan masalah serta solusi yang ditawarkan tidak mencapai kesepakatan di antara pemangku kepentingan. Pada pengembangan konsep *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang teridentifikasi bahwa ada relasi kuasa yang memiliki kepentingan masing-masing namun penawaran pada tiap kalangan dalam penerapannya tidak didapatkan kesepakatan secara bersama sehingga penggunaan perspektif jaringan kebijakan dalam program pengembangan *ecotourism* di Kawasan Karst Rammang-Rammang menjadi sebuah strategi yang baik dilakukan untuk mengimplementasikan produk kebijakan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Jaringan yang dibentuk dan diimplementasi tentunya akan menghadirkan berbagai relasi antar aktor yang terkait dengan *ecotourism*, baik aktor pemerintahan maupun aktor non pemerintahan.

Konsep jaringan kebijakan juga fokus pada pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan publik dengan melibatkan banyak aktor seperti lembaga publik, legislatif, dan organisasi swasta (termasuk kelompok kepentingan, perusahaan,

organisasi nirlaba, dll) (Burt, 211 dalam Alwi, 2022). Peneliti menggunakan teori jaringan kebijakan yang dikemukakan oleh Van Waarden karena dianggap relevan untuk menganalisis jaringan kebijakan pada program pengembangan *ecotourism* di Kawasan Karst Rammang-Rammang. Teori ini memusatkan lebih dalam pada jaringan kebijakan dalam menganalisis peran dari aktor-aktor yang terlibat. Teori jaringan kebijakan yang dipaparkan oleh (Van Waarden, 1992) yang akan menjelaskan dan memberi batasan bagaimana seharusnya para stakeholder bersikap, serta melihat lebih mendalam bagaimana para aktor menjalankan peran mereka masing-masing di dalam jaringan kebijakan untuk mencapai visi dari sebuah kebijakan.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



1.3 Rumusan Masalah

Implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep khususnya di kawasan karst Rammang-Rammang dalam penerapan serta pengembangan konsep *ecotourism* dalam perspektif kebijakan publik dapat dilihat sebagai proses interaksi berbagai kelompok kepentingan yang melibatkan sejumlah aktor dan dipengaruhi oleh kepentingan yang melekat pada kelompok ataupun aktor tersebut. Proses lahirnya agenda kebijakan publik ini merupakan suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan para aktor (*stakeholders*).

(Jones 1994 dalam Jun, 2006), menjelaskan tentang proses kebijakan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses kebijakan difokuskan pada proses-proses kelompok. Pendekatan seperti ini selain mempelajari peranan kelompok kepentingan juga menyidiki kelompok dalam lembaga-lembaga politik.

Pembentukan suatu kebijakan *ecotourism* pada kawasan esensial karst Maros-Pangkep selayaknya mempertimbangkan berbagai kriteria. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang bersifat kompleks, terdapat beberapa unsur utama yang harus diperhatikan salah satunya adalah dengan menggunakan wadah jaringan sebagai tempat berlangsungnya perumusan kebijakan hingga implementasinya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Dinamika terhadap perspektif Jaringan Kebijakan pada Program Pengembangan Ecotourism di Kawasan Karst Rammang-Rammang?” yang penelitian ini difokuskan pada skala desa dengan jbaran pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana proses implementasi kebijakan dalam mengoptimalkan konsep *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang khususnya di Desa Salenrang ditinjau dari dimensi-dimensi jaringan kebijakan (*policy network*) yaitu *actors, functions, structure, institutionalization, rules of conduct, power relations* dan *actor strategies*.”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi jaringan kebijakan yang ada pada proses implementasi kebijakan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang, Desa Salenrang Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui tipe jaringan kebijakan apa yang ada pada proses implementasi kebijakan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang, Desa Salenrang Kabupaten Maros

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan sejumlah sasaran spesifik atas tujuan yang hendak dicapai tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mencari tahu dan menjelaskan fenomena kebijakan melalui pendekatan jaringan kebijakan yang saat ini masih sangat kurang di Indonesia. Jaringan kebijakan dalam konteks formulasi kebijakan ini menggunakan dimensi-dimensi utama *policy network* yang dikembangkan oleh (Van Waarden, 1992) untuk mengidentifikasi tipe jaringan kebijakan yang ada. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan acuan atau pembandingan dengan penelitian lain yang sejenis atau yang akan diteliti dan menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang, terkhusus yang menyangkut implementasi kebijakan yang menyangkut konsep tatakelola sumberdaya esensial secara ekonomi dan ekologi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara *downward* kepada masyarakat Rammang-Rammang dalam melihat serta mengatasi dinamika sosial yang terjadi melalui forum-forum komunikasi dan kesepemahaman antar aktor sehingga *conflict of interest* dan relasi kuasa tidak mengganggu proses pengembangan *ecotourism* yang menjadi konsep tanding untuk pelestarian alam.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. (Creswell & David Creswell, 2018) mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok. Lebih lanjut (Creswell & David Creswell, 2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.

2.2 Desain Penelitian

Cresswell (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian fenomenologis, *grounded theory*, etnografi dan studi kasus.

Strategi ini menekankan pada desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, dari satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Artinya, data yang diperoleh akan dilaporkan dalam bentuk kalimat (narasi) atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hal ini karena studi kasus memungkinkan peneliti untuk memperoleh banyak informasi dengan lebih terperinci. Selain itu, peneliti dapat menyelidiki secara intensif fenomena sebagai fokus penelitian.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan data terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Informan didasarkan atas relevansi, kredibilitas dan kapasitasnya dalam memberikan informasi terkait. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Pemerintah Desa Salenrang, Kabupaten Maros	Penanggung Jawab Ekowisata Rammang-Rammang, BUMDES Appakabaji
2.	Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Kab. Maros	Kepala Bidang Pariwisata Kab. Maros
3.	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Wakil Ketua Pansus Raperda No 3 Tahun 2019, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2019
4.	Badan Pengelola Geopark Maros- Pangkep	Sekretaris BP Geopark Maros- Pangkep
5.	Komunitas Masyarakat Lokal / <i>Local Communities, Local Champion</i>	Komunitas Anak Sungai
6.	Media	Jurnalis Mongabay.id
7.	POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang	Sekretaris POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang
8.	Akademisi (<i>Expert</i>)	Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dari pertanyaan yang timbul pada penelitian di atas, dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan perihal tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan (*observation*), wawancara (*deep interview*), dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dimensi jaringan kebijakan dalam pada proses implementasi kebijakan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang, maka penelitian ini ditempuh dengan menggunakan wawancara mendalam. Sebelum melakukan teknik wawancara mendalam kepada informan, observasi awal dilakukan dalam melihat dan mengamati secara langsung bagaimana dinamika yang terjadi pada lokus penelitian. Dalam hal ini, peneliti kerap mendatangi kawasan karst Rammang-Rammang dan berbincang langsung dengan masyarakat setempat serta figur yang di tokohkan, untuk mengamati secara langsung apa yang sebenarnya terjadi pada penerapan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Wawancara mendalam

dilakukan pada seluruh aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan konsep *ecotourism* di Rammang-Rammang. Selain itu, dibutuhkan pula data sekunder seperti berbagai dokumen berkaitan dengan regulasi yang mengatur implementasi dari keputusan-keputusan yang hadir sebelumnya baik secara tertulis dan tidak tertulis serta dalam ranah pranata formal maupun informal yang dijalankan oleh masyarakat sebagai aktor utama.

2.3.3 Teknik Analisis Data

(Creswell & David Creswell, 2018) menjelaskan bahwa analisis data bertujuan untuk memahami data teks dan gambar sehingga dalam prosesnya melibatkan segmentasi dan pemisah data kemudian menyatukannya kembali. Lebih lanjut, (Creswell & David Creswell, 2018) memaparkan beberapa tahapan dalam analisis data yaitu sebagai berikut.

1. Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)
Tahapan awal dalam analisis data yaitu mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Hal ini melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optic bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual. Selanjutnya menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)
Langkah ini memberikan gambaran umum mengenai informasi dan merefleksikan makna secara keseluruhan. Hal ini seperti apa gagasan umum yang disampaikan informan, apa idenya, hingga apa kesan keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.
3. Mengkodekan Data (*Coding the Data*)
Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian data dengan memberi tanda atau kode. Selanjutnya menulis catatan-catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Semua data (kalimat atau gambar) yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan memberi nama atau label pada kategori tersebut. Pemberian nama atau label tersebut seringkali didasarkan pada bahasa asli atau ucapan sebenarnya dari informan.
4. Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*)
Tahapan ini menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam suatu latar. Selain itu, penggunaan kode juga dilakukan untuk menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori. Tema-tema inilah yang akan muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.

2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Gibbs dalam Creswell (2018) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan dengan menggunakan prosedur tertentu. Validitas merupakan kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan apakah temuannya akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca suatu laporan. Beberapa prosedur validitas, yaitu:

1. Melakukan pelacakan sumber data yang berbeda, yaitu dengan memeriksa bukti dari sumber tersebut kemudian menggunakannya untuk membangun justifikasi yang koheren terhadap tema.
2. Menggunakan pengecekan anggota, yang mana dilakukan untuk menentukan keakuratan temuan dengan mengembalikan laporan akhir atau deskripsi spesifik atau tema kepada peserta dan menentukan apakah peserta merasa bahwa temuan tersebut akurat. Prosedur ini membuka kemungkinan untuk melakukan wawancara lanjutan dengan informan penelitian dan memberikan kesempatan untuk mereka mengomentari temuan.
3. Menggunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyapaikan temuan.
4. Memperjelas bias yang dihadirkan peneliti ke dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menciptakan narasi yang terbuka dan jujur yang akan diterima dengan baik oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi negatif atau tidak sesuai yang bertentangan dengan tema.
6. Menghabiskan waktu lama di lapangan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.
7. Menggunakan pembekalan rekan untuk meningkatkan keakuratan akun.
8. Menggunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek.

Gibbs dalam Creswell (2018) juga menjelaskan bahwa reliabilitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan peneliti konsisten pada peneliti yang berbeda dan proyek yang berbeda. Berikut uraian prosedur reliabilitas kualitatif.

1. Memeriksa transkrip untuk memastikan bahwa transkrip tersebut tidak memiliki kesalahan nyata yang dibuat selama transkripsi.
2. Memastikan tidak terjadi penyimpangan definisi kode.
3. Untuk penelitian tim, lakukan proses koordinasi komunikasi antar pembuat kode melalui pertemuan rutin yang terdokumentasi dan dengan berbagai analisis.
4. Melakukan cross-check kode untuk membandingkan hasil yang diperoleh secara independen.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas terkait Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori jaringan menurut Van Waarden yang memuat beberapa dimensi utama untuk memahami fenomena jaringan baik pada proses perumusan kebijakan maupun pada tahap implementasi kebijakan dimana terdapatnya *public sphere* pada tahapan formulasi maupun implementasi kebijakan publik.

Konsep *ecotourism* pada pengembangan kepariwisataan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kawasan esensial terutama di gugusan karst Rammang-Rammang tanpa harus merusak ekosistem lingkungan dan menutup celah industri ekstraktif kembali beroperasi. Menurut Subadra (2008) dalam (Marco et al., 2015) *ecotourism* merupakan aktivitas perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang masih alami maupun buatan serta budaya yang ada bersifat informatif dan partisipatif dengan tujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. *Ecotourism* dapat memberikan manfaat pada peningkatan ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut serta dalam pelestarian alam. Dalam pelaksanaannya, *ecotourism* diimplementasi melalui banyak aktor dalam melakukan *resource sharing* khususnya pada pengembangan untuk mencapai kualitas yang lebih baik.

Penelitian ini berupaya menjelaskan proses implementasi kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya di perda serta perdes terkait dalam mengembangkan *ecotourism* kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros. Berikut adalah hasil penelitian tentang Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros dengan menggunakan elemen-elemen utama *policy network* yang dikemukakan oleh (Van Waarden, 1992).

3.1 Aktor (Actors)

Aktor merupakan dimensi pertama yang dibahas dalam konteks jaringan kebijakan. Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa pembahasan aktor berkaitan dengan jumlah *stakeholder* yang tergabung dalam jaringan. Aktor berperan penting dalam perumusan dan pengimplementasian pada kebijakan. Hal ini karena aktor adalah representasi dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan khususnya pada pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Jumlah partisipan yang terlibat pada jaringan kebijakan akan menentukan besaran/skala jaringan. Semakin banyak aktor yang terlibat maka semakin baik pula jaringan terbentuk. Pada implementasi kebijakan dalam pengembangan *ecotourism* kawasan karst Rammang-Rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, terdapat dua pengelompokan aktor yaitu aktor pemerintahan dan non pemerintahan. Aktor-aktor tersebut terdiri dari institusi hingga komunitas masyarakat lokal yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan *ecotourism* tersebut.

Kehadiran para aktor pada implementasi kebijakan adalah salah satu indikator yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan. Analisis implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang khususnya menggunakan konsep jaringan oleh (Van Waarden, 1992) yang tersusun atas berbagai dimensi dengan runutan yang pertama adalah aktor. Identifikasi aktor pada konsep ini dapat dijabarkan dengan jumlah keterkaitan atau keterlibatan dalam sebuah jaringan. Keterlibatan para aktor untuk mengembangkan *ecotourism* demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian alam di Rammang-Rammang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pariwisata (Kabid Pariwisata) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Maros dalam wawancara mendalam:

“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan khususnya berkaitan dengan ecotourism sendiri, kami sebagai representasi pemerintah daerah yang menangani hal tersebut membuka ruang kerja sama kepada seluruh stakeholder yang terlibat sehingga kami terbuka untuk semua pihak. Dari kami sendiri untuk melakukan hal itu juga dibantu dengan berbagai pihak utamanya yang bisa mempromosikan dan memberi manfaat di Rammang-Rammang. Siapapun itu, kami terima,” (Wawancara, 19/7/2024)

Untuk memenuhi visi dalam pengembangan *ecotourism* yang optimal dalam memenuhi indikator tujuan yang dapat bermanfaat pada perputaran ekonomi sehingga masyarakat sejahtera dan kelestarian alam melalui aktivitas konservasi maka dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dengan seluruh aktor yang memiliki kepentingan dan sumberdaya masing-masing untuk mengimplementasikan kebijakan. Melihat jabaran diatas menunjukkan indikasi keterlibatan para aktor yang memiliki sumberdaya berbeda masing-masing baik dari institusi pemerintah, komunitas masyarakat, badan usaha, akademisi dan media massa. Demikian lanjutan penjelasan dari Penanggung Jawab Ekowisata Rammang-Rammang:

“Yang memegang wewenang pengelolaan wisata di Rammang-Rammang itu POKDARWIS yang di SK-kan oleh Dinas Pemda dan regulasinya dari tingkat Kemenparekraf, sedangkan untuk retribusi itu Pemdes, yang dijalankan sama BUMDES dan regulasinya dari Kemendes. Selain itu, ada komunitas masyarakat yang ikut mengembangkan juga. Kami juga kerjasama dengan perusahaan dengan mengelola dana CSR yang rutin disalurkan untuk kembangkan Rammang-Rammang,” (Wawancara, 20/7/2024)

Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan merupakan salah satu indikator krusial untuk mencapai *ecotourism* yang efektif tak pernah lepas dalam keikutsertaan DPRD Sulsel yang telah menjadi wadah dalam merumuskan Perda KEE Karst Maros-Pangkep yang menjadi payung hukum dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Selain itu, para aktor dari multisektor yang mengambil tempat dalam keterlibatannya dalam

pengembangan *ecotourism* yaitu BP Geopark Maros-Pangkep dalam edukasi serta konservasi kawasan *geopark* yang didalamnya terdapat kawasan Rammang-Rammang. Ada pula aktor lainnya yaitu tim pengelola kawasan pariwisata (POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang), akademisi, media dan komunitas masyarakat lokal yang mengisi ruang aktor di jaringan implementasi kebijakan tersebut. Keikutsertaan komunitas masyarakat ditegaskan dengan hasil wawancara bersama Sekretaris BP Geopark Maros-Pangkep:

“Masyarakat lokal sebagai pengelola utama aktivitas kepariwisataan disana punya andil yang penting, makanya kami selalu bekerjasama dengan mereka. Apalagi leader dari komunitas yang menaungi masyarakat lokal disana telah menerima banyak pengakuan salah satunya anugerah Kalpataru dan Kick Andy Heroes. Kami rasa kerjasama tersebut sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ecotourism Rammang-Rammang,” (Wawancara, 24/7/2024)

Keterlibatan komunitas masyarakat lokal pula disampaikan saat wawancara dengan Wakil Ketua Pansus Raperda No 3 Tahun 2019 dan juga merupakan Anggota DPRD Sulsel 2009-2019:

“Semua variabel yang diperlukan kami gunakan, kurang lebih ada 20-30 aktor yang terlibat. Baik yang pro dan kontra, kami dengarkan semua. Kami katakan mau pembentukan naskah akademik dan kami anggap cukup. Salah satu yang banyak membantu saat perumusan Perda ini adalah Iwan Dento dengan Komunitas Anak Sungainya,” (Wawancara, 18/7/2024)

Pernyataan terkait keikutsertaan komunitas masyarakat lokal kembali dipertegas dengan hadirnya argumentasi yang disampaikan langsung oleh Penanggung Jawab Ekowisata Rammang-Rammang serta BP Geopark Maros-Pangkep. Keikutsertaan komunitas masyarakat lokal merupakan hal yang memiliki posisi krusial dalam struktur jaringan. Peran komunitas masyarakat lokal sebagai penghubung komunikasi dan kepentingan masyarakat ke berbagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan. Selain komunitas masyarakat lokal, keterlibatan media dan akademisi dalam jaringan implementasi ini turut ditegaskan oleh Sekretaris POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang:

“Dalam jejaring-jejaring yang ada, Rammang-Rammang akhirnya dikenali banyak orang kan pertama kali karna ada yang liput. Walau dulu banyak liput karna kompetisi ruang hidup karna tambang disini namun karna itumi bisa dibidang media sangat berkontribusi juga. Setelah itu ada kampus-kampus datang meneliti tentang Rammang-Rammang hingga muncul lah banyak ide salah satunya menduniakannya dengan cara memasukkannya di Jadesta untuk nasional dan di geopark world heritage yang diakui UNESCO,” (Wawancara, 20/7/2024)

Penuturan aktor yang menjadi informan di atas menjabarkan upaya mengembangkan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang ini harus melibatkan banyak pihak dalam jejaring yang luas, tidak bertumpu semata pada pemerintah yang menjadi pemangku kebijakan melainkan sangat butuh *exchange resources* atau menukarkan sumberdaya masing-masing dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, aktor menjadi komposisi yang krusial dalam efektifnya implementasi kebijakan. Hal tersebut dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antar aktor yang hadir khususnya dalam mengembangkan *ecotourism* di Rammang-Rammang.

Pada jaringan implementasi kebijakan, aktor erat kaitannya dengan individu dan organisasi/institusi yang terlibat dalam jaringan sebagai gambaran *stakeholder* terkait. Dalam melihat aktor, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana jumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Alasan ini karena ukuran jaringan ditentukan oleh sejauh dan seluas apa aktor itu terlibat. Lebih lanjut, karakteristik jaringan kebijakan akan berefek pada sumberdaya para aktor dan *positioning*-nya masing-masing. Ditinjau dari hasil wawancara bersama para informan, aktor yang ikut serta dalam mengembangkan *ecotourism* Rammang-Rammang di Desa Salenrang, Kabupaten Maros diidentifikasi dari pemerintah daerah, komunitas masyarakat lokal, akademisi, badan usaha dan media massa. Berikut para aktor yang terlibat serta jumlahnya:

Tabel 3. 1 Aktor pada Implementasi Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros

Aktor	Institusi/Lembaga	Jumlah
Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bidang Pariwisata Kabupaten Maros 2. Pemerintah Desa Salenrang, Penanggung Jawab Ekowisata Rammang-Rammang BUMDES Appakabaji 3. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, BP Geopark Maros-Pangkep	4
Komunitas Masyarakat Lokal	1. Komunitas Anak Sungai 2. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Hutan Batu Rammang-Rammang	2

Media	1. Mongabay.id	1
Akademi	a) Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin	1

Sumber: Hasil wawancara, 2024

Ecotourism merupakan salah satu upaya dalam menjadikan kawasan karst Rammang-Rammang sebagai kawasan karst yang dilindungi dan diakui dunia melalui UNESCO Global Geopark demi menjaga ekosistemnya tetap terjaga. Untuk mengimplementasi hal tersebut setidaknya semua pihak yang terlibat perlu memenuhi dua indikator utama dalam konsep *ecotourism* yaitu menjadikan wilayah kepariwisataan yang aktif melakukan konservasi namun juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi kelompok masyarakat lokal yang bermukim disana.

Namun, pengembangan *ecotourism* ini penuh kompleksitas dari dinamika yang terjadi sebagai fenomena sosial disana sehingga diperlukan keterlibatan aktor lebih dari satu pihak atau biasa disebut multiaktor. Upaya ini diharapkan mampu menghadirkan solusi untuk menyelesaikan problematika melalui kesepemahaman dari perspektif yang berbeda dengan memberikan pertukaran sumberdaya untuk terlaksananya solusi atas masalah yang hadir. Aktor sebagai penentu kebijakan perlu memahami permasalahan dan kebutuhan publik, karena tujuan utama kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan publik (Jones dalam Sopia Rukmana et al., 2020).

Setelah melakukan wawancara mendalam berbagai para informan, dapat diidentifikasi bahwa adanya keseimbangan jumlah aktor yang terlibat antara pemerintah maupun non pemerintah. Berdasarkan hal ini, karakteristik jaringan dari jumlah keterlibatan para aktor tidak di dominasi oleh pemerintah. Keikutsertaan para aktor dalam mengembangkan *ecotourism* didasarkan oleh kepentingan masing-masing yang bermuara pada pertarungan ruang untuk menguasai dan mengelola Rammang-Rammang walau demikian secara tidak langsung tiap aktor telah melakukan *resources sharing* untuk melindungi Rammang-Rammang dari ancaman ekstraktif serta perusakan ekologis. Pada aktor pemerintah, Dinas yang membawahi secara integral dalam pengembangan *ecotourism* adalah Disparpora Maros Bidang Pariwisata. Dalam hal yang mengelola serta bertanggung jawab pada pelaksanaan ekowisata di Rammang-Rammang khususnya dalam otoritas penarikan retribusi dan pendapatan, Pemerintah Desa Salenrang dalam hal ini BUMDES Appakabaji pun terlibat secara aktif. Kedua aktor ini terlibat dalam pelaksanaan birokrasi yang dilaksanakan dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang.

Adapun yang menjadi katalisator dalam menampung serta wadah aspirasi masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan pada ranah perumusan kebijakan dilibatkan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk melakukan fungsi pengembangan dalam konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi melalui edukasi serta *formal advisor* bagi para aktor yaitu BP Geopark Maros-Pangkep. Sementara itu, dalam menjalankan

pengelolaan sumberdaya yang ada di Rammang-Rammang dan perpanjangan tangan dari masyarakat lokal untuk memberikan pendapat atas kepentingan yang hadir, Komunitas Anak Sungai memiliki *brand positioning* kuat dalam kesepakatan sosial yang terjalin di masyarakat Rammang-Rammang. Adapun secara formal untuk mengelola destinasi pariwisata di Rammang-Rammang, POKDARWIS menjadi aktor desentral dari pemerintah daerah untuk memotivasi dan menyadarkan masyarakat tentang aktivitas pariwisata.

Selain itu, keterlibatan media pegiat lingkungan dan ekologi seperti Mongabay.id yang tergabung dalam jaringan media lingkungan internasional menjadi aktor yang menaruh kepedulian terhadap pengembangan *ecotourism* di kawasan Rammang-Rammang. Akademisi sebagai penasehat ilmiah bagi seluruh *stakeholder* untuk mengambil keputusan pengembangan *ecotourism* memiliki peran kompleks dalam memberikan pertimbangan baik saran dan rekomendasi secara formal maupun non formal.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* kawasan karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros ditemukan bahwa aktor yang mempunyai keterlibatan antar satu dan lainnya diidentifikasi sebagai para aktor dalam jaringan. Jika dianalisa lebih lanjut, jumlah aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang mengalami keseimbangan baik secara peran maupun kepentingan yang dilihat pada unsur-unsur penting dalam pelaksanaan suatu jaringan yaitu pemerintah, komunitas masyarakat, media, akademisi serta badan usaha. Karakteristik para aktor serta sikap antara satu sama lain beragam, secara langsung para aktor dalam jaringan saling memiliki kepentingan yang berbeda khususnya dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang namun yang unik adalah walau ada perbedaan tersebut secara tidak langsung para aktor saling memenuhi kepentingan yang mereka miliki. Fenomena ini bisa ditemukan pada hubungan antara komunitas masyarakat lokal yang memilih sikap untuk resisten terhadap beberapa regulasi serta kebijakan yang hendak diimplementasikan oleh pemerintah dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang atas dasar ketidakpercayaan dan latar belakang secara historis yang tertanam kepada pemerintah sehingga menciptakan kesepakatan sosial dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang yang biasa dikenali sebagai kesadaran kolektif atau pranata lokal.

Walaupun demikian, aktivitas ini secara tidak langsung menciptakan pertukaran sumberdaya untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu indikator utama pada pelaksanaan *ecotourism* sendiri berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pemerintah yang seharusnya hadir sebagai *leading sector* terbantu dengan aktivitas komunitas masyarakat lokal yang resisten karna mengundang simpati dan perhatian banyak pihak ke pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Sehingga secara tidak langsung, baik pemerintah maupun komunitas masyarakat lokal yang menjadi para aktor dalam jaringan ini memenuhi kepentingannya masing-masing. Unsur kompetitif dan

konflikual yang hadir ini menciptakan peluang tersendiri untuk para aktor mencapai tujuan serta kepentingannya. Yang menjadi tugas bersama adalah bagaimana para aktor bisa mencakup kepentingan dan kebutuhan masing-masing dengan secara profesional tanpa melibatkan tendensi atas personal dari tiap aktor yang terlibat.

3.2 Fungsi (*Function*)

Pembahasan selanjutnya setelah mengidentifikasi para aktor dalam konsep jaringan adalah mengetahui sejauh mana para aktor menjalankan fungsi dan perannya masing-masing terkhusus pada pengembangan *ecotourism* kawasan karst Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kabupaten Maros. Fungsi dalam penerapan jaringan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan para aktor untuk memberikan ruang kepada pengambilan keputusan, konsultasi (pertukaran informasi), negosiasi (pertukaran sumberdaya dan/atau kinerja), koordinasi tindakan, dan kerjasama dalam pembentukan kebijakan, implementas dan legitimasi. Skala besar dan kecilnya masalah pun dibahas secara relevan disini (Rulinawaty, 2020). Berkaitan dengan fungsi pada pengembangan *ecotourism* di kawasan Rammang-Rammang, Kepala Bidang Pariwisata (Kabid Pariwisata) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Maros menjelaskan dalam wawancara mendalam:

“Mengenai peran dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Maros tentu berbicara peran banyak orang karna ini cukup luas. Tiap orang itu punya tugas masing-masing sesuai apa yang mereka punya, misalnya di pemerintah daerah terkait pariwisata yaitu kewenangannya berada dalam lingkup kami. Sebagai institusi pemerintah, kami bertanggungjawab atas program-program yang dibuat pemerintah dan tentu semua bertujuan untuk kesejahteraan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Tentu saja program tadi melewati banyak diskusi dan sosialisasi ke masyarakat supaya programnya tepat sasaran dan kami tidak sendiri. Ada generasi milenial kami di dara daeng, ada genpi, Pokdarwis macam-macam lah yang muaranya pada bagaimana memenuhi tujuh poin sapta pesona dari kementerian,” (Wawancara, 19/7/2024)

Pada hasil wawancara yang dilakukan, Bidang Pariwisata Disparpora Kabupaten Maros memiliki peran solid sebagai aktor yang bertanggungjawab dalam pembuat dan pelaksana kebijakan serta menjadi wadah jaringan bagi para aktor dalam pengembangan *ecotourism* kawasan karst Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kabupaten Maros. Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengembangan *ecotourism* Bidang Pariwisata Kab. Maros melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* di bidang pemerintah daerah (dinas PU dan dinas LHK) dan sosialisasi ke masyarakat bersama Genpi Maros, Dara Daeng dan Pokdarwis sebagai *ambassador/representing* kepariwisataan. Peran pelaksana kebijakan untuk pengembangan *ecotourism* juga dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana disampaikan oleh Penanggung Jawab Ekowisata Rammang-Rammang, BUMDES Appakabaji:

“Berbicara masalah peran, sederhananya kami berada dalam naungan Kementerian Desa untuk menjalankan tupoksi sesuai regulasi yang ada. Dalam lingkup desa dan pariwisata di Rammang-Rammang sendiri kami lah yang bertanggung jawab atas retribusi yang didapatkan dari wisatawan yang datang, tentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga kami BUMDES di bawah naungan pemerintah desa ikut menjalankan pengawasan bersama geopark untuk menjaga alamnya Rammang-Rammang. Ada semua di perdes itu. Intinya perannya kami memastikan bahwa uang yang masuk di Rammang-Rammang itu bisa mensejahterakan semua masyarakat yang ikut serta di ekowisata,” (Wawancara, 20/7/2024)

BUMDES Appakabaji sebagai tim pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah desa mempunyai tanggungjawab untuk mengelola retribusi untuk pengembangan *ecotourism* dan peningkatan PADes di Desa Salenrang. Peran ini sangat krusial karena salah satu unsur untuk manajemen dalam mengelola suatu wilayah atau institusi adalah *money* (anggaran). Dengan masuknya retribusi yang diperoleh dari wisatawan yang datang berkunjung di Rammang-Rammang akan menambah daya pengembangan dan pengoptimalan destinasi wisata serta potensi lainnya pada teknis *ecotourism* di Rammang-Rammang.

Wawancara pula dilakukan ke DPRD Sulsel yang memiliki peran penting khususnya dalam fungsi legislasi serta perumusan kebijakan sebagai basis legitimasi dan payung hukum dalam menjalankan pengembangan *ecotourism* di kawasan karst Rammang-Rammang dalam lingkup KEE Maros-Pangkep. Wakil Ketua Pansus Raperda No 3 Tahun 2019 tentang KEE Maros-Pangkep menyampaikan peran tersebut dalam wawancara:

“Kami menjalankan fungsi legislasi di DPRD, salah satunya ya itu tadi bagaimana menyusun peraturan daerah yang dianggap perlu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Perda ini kan pada dasarnya sebagai wujud pertanggungjawaban kami selama duduk di dewan apalagi kami juga masyarakat yang langsung bersentuhan dengan karst. Kami sadar perda ini belum sempurna namun yang kami yakini setidaknya ada payung hukumnya itu didalam, persoalan eksekusi bukan lagi wewenang kami,” (Wawancara, 19/7/2024)

Dari wawancara di atas, pemerintah dalam hal ini DPRD Sulsel memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang karena fungsi legislasi di perumusan kebijakan tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* sebagai panduan yang legal dan formal untuk mencapai tujuan pengembangan *ecotourism* itu sendiri. Dalam perumusan ini, DPRD Sulsel juga banyak menggelar dan menerima masukan secara ilmiah baik berupa naskah akademik maupun *informal advice* dari BP Geopark Maros-Pangkep sebagai wadah pengkajian terhadap kondisi keanekaragaman hayati yang ada di gugusan karst meliputi kawasan Rammang-Rammang karena kanalisasi melalui RDP belum cukup

menjadi landasan untuk dirumuskannya kebijakan KEE Maros-Pangkep ini. Berikut wawancara bersama Sekretaris BP Geopark Maros-Pangkep:

“Geopark Maros-Pangkep berperan dalam koordinasi dengan pemerintah baik pusat, provinsi serta kabupaten/kota terkait upaya konservasi pada kawasan MPGp, secara pengembangan sendiri kami punya empat komponen dasar dalam menjalankan peran yaitu konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Tentu itu melalui kaidah yang dijalankan oleh Geopark. Secara koordinasi, kami menjadi ruang saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan aktivitas di kawasan Geopark, hanya sebatas memberikan tinjauan dan tidak memiliki intervensi sama sekali. Namun, selama ini ketika ada perbincangan tentang bentangan karst di Maros-Pangkep, kami selalu punya tempat dalam forum-forum tersebut,” (Wawancara, 24/7/2024)

Melihat peran yang kompleks dalam perumusan hingga implementasi kebijakan dalam jajaran pemerintah, tentu pengembangan *ecotourism* kawasan karst Rammang-Rammang sendiri tak luput dari peran-peran krusial yang tidak terikat langsung oleh pemerintah (*non-government*). Para aktor non pemerintah ini juga memiliki andil dalam pengembangan *ecotourism* tersebut sesuai dengan latar belakang hingga sumberdaya yang dimiliki masing-masing. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, peran komunitas masyarakat lokal yakni Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Hutan Batu Rammang-Rammang dan Komunitas Anak Sungai sangat berperan dalam aktivitas pengelolaan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Peran POKDARWIS sendiri dijelaskan oleh wawancara dengan Sekretaris POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang yaitu:

“Kalo ditinjau dari SK dan Perdes, Pokdarwis itu tugasnya di pengelolaan wisata yang ada di Rammang-Rammang. Bedanya dengan BUMDES, Pokdarwis itu tidak pegangki uang, cuman menjalankan saja pengelolaan ntah itu fasilitas kah, kegiatan kah. Nah pengelolaan itu kalo di Perdes kayakji semacam wadahnya masyarakat disini kalau mauki manfaatkan lahannya untuk dijadikan destinasi wisata, kitami disitu tinjau karna haruski dulu na sampaikan baru didaftarki, seperti kayak pajolloro itu kita nanti atur nomor antriannya toh supaya bisa beroperasi. Sederhanaji sebenarnya,” (Wawancara, 20/7/2024)

Penjelasan di atas ini menjabarkan bahwa peran dari POKDARWIS sebagai salah satu aktor dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang telah sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam dokumen formal dan regulasi yang mengaturnya. Walau demikian, ada komunitas masyarakat lokal yang melihat dari perspektif berbeda dan menilai bahwa pengelolaan oleh POKDARWIS belum optimal secara konsep maupun teknis. Akhirnya, kehadiran komunitas masyarakat lokal namun diluar integral pemerintah (*non-government actor*) dalam mengembangkan Rammang-Rammang karena latar belakang historis maupun dinamika sosial yang terjadi secara internal. Namun, jika ditinjau dari perspektif lain

seperti pengakuan secara sosial dan secara pencapaian/prestasi, komunitas masyarakat lokal ini diperhitungkan perannya dalam menjalankan pariwisata yang berbasis komunitas (*Community Based Tourism*). Berikut peran Komunitas Anak Sungai yang disampaikan dalam wawancara:

“Menurut saya hari ini, membangun kesadaran itu bisa lebih cepat dengan kesepakatan sosial, regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan aturan-aturan yang dibuat sebenarnya kan banyak yang gagal. Karena regulasi itu dibuat tanpa menyusun perangkat penegakan yang lengkap. Kesepakatan sosial tidak berbicara tentang aturan, tapi dia berbicara soal rasa. Kita bersepakat untuk tidak buang sampah disini, mungkin ketika kita ingin buang sampah kita akan berpikir ah tidak enak deh, sudah mki bersepakat tidak boleh buang sampah. Artinya meskipun saya tidak ada, itu bisa menghalangi orang untuk buang sampah disitu, karna itu kesepakatan sosial dan itu saya rasa bisa membangun kesadaran kolektifnya,” (Wawancara, 29/7/2024)

Komunitas masyarakat merupakan sebuah bagian yang tak dapat dipisahkan dari konsep dan teknis implementasi *ecotourism*. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan *ecotourism* akan mendorong pariwisata menjadi lebih baik (Frasawi, 2018). Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Komunitas Anak Sungai, kesepakatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pola komunikasi yang unik sehingga memberikan kesadaran kolektif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang khususnya dalam upaya komitmen menjaga alam namun tetap memanfaatkannya demi kesejahteraan masyarakat. Iwan Dento sebagai koordinator Komunitas Anak Sungai juga percaya bahwa pariwisata ini bukan konsep yang paling baik, namun setidaknya mampu menjadi konsep tanding untuk menutup celah industri ekstraktif kembali muncul. Lebih tegas dilanjutkan dalam wawancara:

“Pariwisata bukan yang terbaik, tapi dalam bertarung terhadap ruang yang ada di Rammang-Rammang terhadap tambang yang merusak, konsep tanding pariwisata adalah pilihan yang optimal,” (Wawancara, 29/7/2024)

Namun, akademisi dan peneliti dari Fakultas Kehutanan UNHAS menambahkan bahwa penting untuk melihat bukan pada satu komunitas masyarakat yang tinggal di tengah aliran sungai pute di Rammang-Rammang melainkan harus melihat secara menyeluruh dari hulu ke hilir agar pengembangan *ecotourism* ini bisa terlaksana dengan baik. Berikut wawancara dengan Dosen dan Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin:

“Selaku akademisi, kami melihat dan menganalisa bukan hanya di titik tengah aktivitas masyarakat terjadi apalagi yang jumbuh dikenali banyak orang seperti contohnya di sepanjang jalur jolloro’ itu melakukan aktivitas pariwisata biasanya, tapi kami menilai bahwa ini perlu dilihat dari hulu ke hilir sehingga bisa terlaksana dengan optimal. Seperti halnya buat indomie yang komplit, ada ayamnya, ada telurnya, ada mienya, ada sayurnya, tidak boleh

kita lihat ayamnya saja karna ini berbicara indomie komplit. Begitu juga dengan pengembangan ecotourism, harus saling kerjasama secara keseluruhan. Kami sudah membantu menyusun roadmap untuk pelaksanaan itu, eksekusinya itu bagiannya mereka,” (Wawancara, 2/8/2024)

Dari wawancara di atas, akademisi melaksanakan perannya untuk memberikan masukan dan pertimbangan ilmiah kepada seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Untuk memenuhi peran tersebut, akademisi menegaskan bahwa perlu adanya partisipasi yang melibatkan seluruh pihak untuk bekerja sama sehingga tercipta sebuah kesatuan dan kesepemahaman dalam melihat pengembangan *ecotourism*. Pertimbangan yang diberikan oleh akademisi ini tentu saja telah melalui penelitian serta penarikan data secara langsung oleh masyarakat sehingga membutuhkan pelaksanaan sesegera mungkin. Selain memberikan pertimbangan, hasil penelitian tersebut akhirnya menjadi struktur perencanaan untuk melakukan pengembangan yang diserahkan pelaksanaannya kembali kepada aktor berwenang dalam hal ini pemerintah setempat serta komunitas masyarakat lokal yang secara langsung bersentuhan dalam ranah pengembangan. Proses ini pun tak luput dari peran media dalam menyebarkan informasi kepada seluruh aktor agar pertukaran sumberdaya bisa terlaksana karena dalam latarbelakang historisnya, dinamika yang terjadi dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang didasari oleh alur komunikasi yang tidak terlaksana secara efektif. Ini disampaikan oleh Jurnalis Mongabay.id seperti berikut:

“Jika dikatakan sebagai masalah, tidak juga. Saat saya disana, masyarakat lokal tidak pernah bertikai yang seperti apa, bahkan mereka hanya menyebut itu sebagai dinamika sosial. Masalah biasanya hadir kalau ada orang dari luar yang ingin mencampuri urusan-urusan masyarakat ataupun pemerintah yang memaksakan kebijakannya yang kurang efektif dari pandangan masyarakat. Tapi sejauh saya disana, tidak ada yang terlalu konflik dan semacamnya. Disana kami mencoba mengambil seluruh pandangan yang ada, dari masyarakat maunya apa, dari pihak lain maunya apa. Karena persoalan disini sebenarnya hanya komunikasi walaupun sudah terlalu kompleks,” (Wawancara, 24/7/2024)

Penyampaian dari jurnalis Mongabay.id ini mempertegas bahwa masalah yang terjadi di Rammang-Rammang dalam pengembangan *ecotourism* didasari pola komunikasi antar aktor yang kurang dan sulit untuk dipertemukan. Media berusaha untuk melihat dari banyak perspektif kemudian menyampaikan dalam bentuk informasi-informasi yang bisa diserap oleh masing-masing aktor nantinya. Disini, peran media dibutuhkan untuk menghubungkan para aktor yang saling resisten satu sama lain sehingga bisa saling mengetahui keinginan masing-masing baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pengelola pariwisata di Rammang-Rammang. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk *resources sharing* yang tercipta secara dua arah dengan validitas yang faktual dan terjaga kebenarannya sehingga tidak menciptakan

konflik lainnya. Media juga berperan dalam pendistribusian informasi terhadap daya tarik yang ada di Rammang-Rammang sehingga mengundang wisatawan untuk datang berkunjung kesana. Ini juga ditegaskan kembali oleh Jurnalis Mongabay.id secara lanjut:

“Tak hanya itu, tentu saja kami membantu untuk menyebarkan daya tarik Rammang-Rammang melalui jejaring media yang kami miliki. Misalnya dalam liputan televisi dan artikel di media lokal dan nasional bahkan internasional, itu semua akan berdampak besar bagi Rammang-Rammang,” (Wawancara, 24/7/2024)

Upaya ini juga dilakukan aktor lainnya seperti yang dilakukan oleh BP Geopark Maros-Pangkep dan DPRD Sulsel agar semua pendapat bisa diserap. Sekretaris BP Geopark Maros-Pangkep juga menyampaikan perihal yang sama:

“Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali aktor yang berkepentingan untuk kembangkan ini kawasan Rammang-Rammang sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk saling mempertemukan mereka agar kepentingan masing-masing bisa diketahui bersama. Hanya saja ketika kami berikan wadah ada beberapa pihak yang tidak hadir atau menolak untuk ikut karna resistensi itu. Yang kami bisa sampaikan yah kalo begitu, pada akhirnya semua bertemu di akhir saja. Makanya kompleks jika dibicarakan namun perlu dikomunikasikan bersama,” (Wawancara, 24/7/2024)

Anggota DPRD Sulsel 2009-2019 yang juga wakil ketua pansus raperda tentang KEE Maros-Pangkep menegaskan hal yang sama:

“Persoalan komunikasi ji ini walau tingkat tinggi dan sangat kompleks karna sudah alot pembahasannya, bayangkan ketika kami buka wadah pendapat itu di DPRD ada lebih 100 mungkin yang mau sampaikan dia punya argumentasi, tapi itulah tidak cukup waktu bos. Setidaknya kami usahakan cari memang aktor-aktor kuncinya dan kanalisasi pendapatnya. Saya kira beberapa kesamaan dari pendapat-pendapat yang lain itu sudah terwakilkan,” (Wawancara, 18/7/2024)

Dua pendapat dalam wawancara di atas kembali menegaskan para aktor menghadapi permasalahan ini didasari karna komunikasi yang tercipta tidak terjalin dengan baik oleh banyak kalangan. Wadah-wadah jaringan untuk berkomunikasi tersebut sudah berulang diadakan namun sulitnya menemukan benang merah dari tiap aktor dan ego-sektoral serta relasi kuasa menjadi hal yang perlu diatasi agar pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bisa optimal. Pentingnya satu forum yang mengkhususkan pembahasan terkait kepentingan-kepentingan yang hadir di Rammang-Rammang agar *masterplan* dari satu sama lain bisa terkoneksi.

Dalam jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta perlindungan pada alam sebagai bentuk komitmen bersama dari para aktor, fungsi dari masing-masing

stakeholder harus dilaksanakan dengan optimal hingga mencapai tahapan *resource sharing* baik langsung maupun tidak langsung agar semua kewenangan dan tanggungjawab bisa terlaksana. Dimensi fungsi di konteks jaringan ini, fungsi diartikan sebagai peran aktor dalam melakukan pertukaran sumberdaya dan kerjasama para aktor dalam jaringan. Jika dilihat secara seksama, maka fungsi dari para aktor yang terlibat dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang yaitu:

Tabel 3. 2 Fungsi Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang

Aktor	Peran	Pertukaran Informasi	Pertukaran Sumberdaya	Kerjasama
Pemerintah a) Bid. Pariwisata Disporpar Kab. Maros b) DPRD Provinsi Sulsel Tahun 2009-2019 c) Disbudpar Sulsel (BP Geopark Maros-Pangkep) d) Pemerintah Desa Salenrang	a) Pelaksana dan Penanggung Jawab Pengembangan Pariwisata (Wilayah) b) Wadah jaringan dan merumuskan kebijakan	Dua arah	Otoritas, Informasi dan Anggaran	Ada
Komunitas Masyarakat a) POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang b) Komunitas Anak Sungai	a) Pendampingan dan pelibatan masyarakat lokal b) Penyedia unsur kepariwisataan c) Wadah aspirasi	Dua arah	Pelibatan masyarakat lokal, Informasi, pelaksanaan kepariwisataan	Ada

	masyarakat setempat			
Akademisi a) Dosen dan Peneliti Fakultas Kehutanan UNHAS	a) Edukasi b) Penasehat c) Pertimbangan Ilmiah	Dua arah	Informasi	Ada
Badan Usaha a) BUMDES Appakabaji	a) Pelaksana kebijakan b) Penanggung jawab retribusi pariwisata (Wilayah)	Dua arah	Anggaran, Pelaksana kepariwisataan	Ada
Media a) Mongabay.id	a) Penyebaran Informasi b) Edukasi	Dua arah	Informasi	Tidak Ada

Sumber : Hasil Wawancara, 2024

Dalam jaringan, aktor mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Untuk mencapai tujuannya, fungsi diperlukan untuk memenuhi hal dalam pengembangan *ecotourism* terkhusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian alam di Rammang-Rammang. Pemerintah daerah yang direpresentasikan oleh para aktor dalam hal ini Disparpora Kab. Maros Bidang Pariwisata, Pemerintah Desa Salenrang dalam hal ini BUMDES Appakabaji, DPRD Sulawesi Selatan dan Disbudpar Sulsel dalam hal ini BP Geopark Maros-Pangkep sebagai aktor yang bertanggungjawab atas perumusan hingga pelaksanaan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang yang berperan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan.

Pada pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah beragam dari masing-masing aktor sesuai perannya. Bidang Pariwisata Disparpora sebagai pelaksana kebijakan dari program kepariwisataan yang dibuat oleh pemerintah daerah di ranah eksekutif. Ini berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada di lingkup pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten seperti Perda No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Maros Tahun 2022-2025 dan Perda No 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam tingkat legislatif, pemerintah daerah dalam hal ini DPRD Sulawesi Selatan juga berperan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang dalam Perda No 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep. Ini menjadi

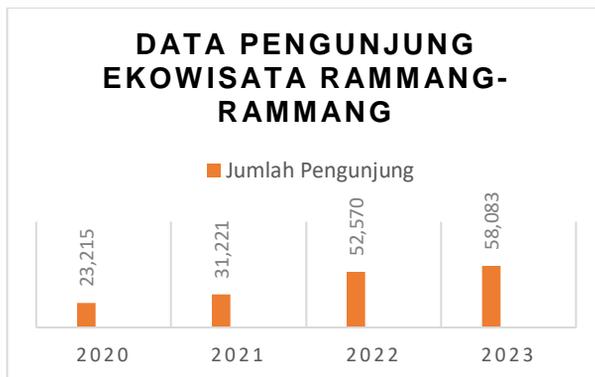
payung hukum dalam menjalankan konservasi dan perlindungan lingkungan utamanya dalam gugusan karst yang terbentang di Kabupaten Maros-Pangkep dengan Rammang-Rammang yang masuk dalam wilayah tersebut. Luaran ini memberikan petunjuk dan tata kelola tentang batasan, kewenangan serta pertanggungjawaban atas pengelolaan karst. Ini juga sebagai salah satu landasan hukum yang dipakai pada pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dilaksanakan oleh Disbudpar Sulawesi Selatan dan Pemerintah Desa Salenrang. Upaya yang dilakukan oleh Disbudpar Sulsel dalam pengembangan *ecotourism* tertuang pada SK Gubernur Sulawesi Selatan No 1220 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengelola Taman Bumi/Geopark Nasional Maros Pangkep. Hal tersebut sangat krusial karna menjadi landasan atas perlindungan keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya. Selanjutnya BP Geopark Maros-Pangkep juga sebagai pelaksana kebijakan yang meliputi pengkoordinasian dengan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terkait upaya konservasi di MPGp dan pelaksanaan program tata kelola geopark nasional yang tertuang dalam Perpres No 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi (Geopark). Sebagai badan pelaksana dalam tata kelola geopark, BP Geopark Maros-Pangkep juga berupaya untuk menjaga kawasan karst dengan diakuinya Geopark Maros-Pangkep sebagai *world heritage* atau UNESCO Global Geopark, ini menjadikan Rammang-Rammang di dalamnya turut menjadi geosite dengan perlindungannya berskala internasional. Ini sangat penting dalam implementasi pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang yang memiliki potensi yang sangat kaya.

Dalam skala lebih kecil, Pemerintah Desa Salenrang juga memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini dilaksanakan oleh BUMDES Appakabaji untuk pengelolaan kepariwisataan dan peningkatan fasilitas serta layanan melalui penarikan retribusi. Sebagai aktor yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bidang pariwisata Disparpora Kab. Maros, peran dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengembangan *ecotourism* skala desa dijabarkan pada Perdes No 6 Tahun 2017 sebagai payung hukum dan petunjuk teknis dalam menjalankan fungsi tersebut.

Upaya dari tiap aktor yang tergolong dalam *stakeholder* pemerintah daerah menyesuaikan dari sumberdaya yang dimiliki masing-masing. Ketika ditinjau dan dilakukan analisa berdasarkan data yang didapatkan di lapangan khususnya dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan tingkat konservasi lingkungan menjadi titik temu apakah masing-masing aktor sudah menjalankan perannya secara optimal.

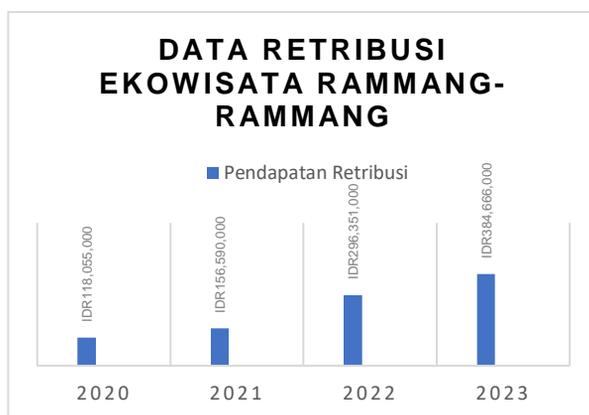
Gambar 3.1 Data Pengunjung dan Retribusi Ekowisata Rammang-Rammang



Sumber: BUMDES Appakabaji, 2024

Adapun data yang diperoleh pada pengunjung berwisata di Rammang-Rammang sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan angka yang relatif meningkat secara bertahap. Pada tahun 2020 tercatat ada 23.215 pengunjung, kemudian di tahun 2021 naik signifikan ke angka 31.221 pengunjung. Setelah mendapati kenaikan yang cukup tinggi, pengunjung Rammang-Rammang mencatat rekor kunjungan terbanyak pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 55.570 dan 58.083 pengunjung. Jika ditinjau, pengelolaan pariwisata di Rammang-Rammang ini telah optimal dilakukan oleh *stakeholder* pengelolaan kepariwisataan dalam mengundang wisatawan untuk menghabiskan waktu dan sumberdaya mereka disana.

Gambar 3.2 Data Retribusi Ekowisata Rammang-Rammang



Sumber: BUMDES Appakabaji, 2024

Kemudian jika ditinjau pada pendapatan yang diperoleh dari penarikan retribusi di Rammang-Rammang, hal yang sama juga ditemukan bahwa ada peningkatan yang signifikan pada rentang waktu empat tahun terakhir. Dapat dilihat

bahwa pada tahun 2020 pendapatan retribusi ekowisata yang diperoleh berkisar di angka Rp. 118.055.000,- kemudian di tahun berikutnya naik pada angka Rp. 156.590.000,-. Yang menjadi perhatian di tahun 2022 dan 2023 peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan retribusi, tercatat pada tahun 2022 menyentuh angka Rp. 296.351.000,- dan naik kembali di tahun 2023 di angka Rp. 384.666.000. Retribusi ini ditarik dari beberapa jenis pungutan yang tertera dalam Perdes Salenrang No 6 Tahun 2017 dengan rincian berupa retribusi obyek pariwisata, retribusi parkir dan retribusi pengelolaan dermaga serta iuran warung makan & café. Angka ini belum dikalkulasikan dengan pendapatan masyarakat dalam sektor usaha lainnya berupa *homestay*, jasa transportasi (*jolloro*), pertanian dan tambak ikan. Pendapatan ini menggambarkan bahwa pengelolaan dalam pendapatan retribusi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat telah optimal dilakukan. Tentu saja dalam hal ini tidak semata-mata menjadi sebuah keberhasilan dari satu aktor semata, tapi para aktor yang berada dalam jaringan implementasi kebijakan dan melakukan pertukaran sumberdaya menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab keberhasilan ini. Ini tak lepas dari peran Bid. Pariwisata Disparpora Kab. Maros dalam memberikan sosialisasi dan informasi tentang aktivitas pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, peran BP Geopark Maros-Pangkep dengan upaya pelestarian di gugusan karst dan UNESCO Global Geopark, legitimasi dan payung hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Sulsel sebagai penguatan legalitas pelaksanaan serta peran Pemerintah Desa.

Walau demikian, optimalnya pengembangan *ecotourism* yang dilaksanakan perannya oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari kontribusi yang dilakukan oleh aktor lainnya seperti komunitas masyarakat lokal dan media dalam memberikan sumbangsinya dengan sumberdaya yang dimiliki masing-masing. Dalam komunitas masyarakat lokal khususnya POKDARWIS, pengelolaan desa wisata yang dilakukan mendapat pengakuan langsung dari Kemenparekraf RI dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia yang berhasil mendapatkan juara 5 di kategori daya tarik pengunjung tahun 2023 se-Indonesia. Ini menjadi sumberdaya yang sangat potensial sehingga menjadi salah satu faktor besarnya angka pengunjung yang datang berwisata dan pendapatan atas retribusi di Rammang-Rammang sehingga pengembangan *ecotourism* bisa berjalan optimal. Kemudian pada komunitas masyarakat lokal yaitu Komunitas Anak Sungai melalui *local communities concept/communities based tourism* dan keunikannya dalam menjalankan kebudayaan untuk konsisten merawat ekosistem karst di Rammang-Rammang menjadikan daya tarik sendiri sehingga pengakuan dari berbagai pihak bermunculan baik nasional hingga internasional. Iwan Dento selaku koordinator Komunitas Anak Sungai akhirnya mewakili masyarakat lokal dianugerahi penghargaan Kalpataru 2023 yang merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas jasa melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Ia juga meraih Kick Andy Heroes tahun 2022 karena jasanya menjaga karst di Rammang-Rammang bersama masyarakat lokal melalui Komunitas Anak Sungai yang ia nahkodai. Hal ini menjadi *branding position* yang kuat bagi ekosistem ekonomi dan

lingkungan di Rammang-Rammang karena telah dikenali lewat penghargaan-penghargaan tersebut sehingga membawa daya tarik tersendiri untuk wisatawan berkunjung dan menghabiskan waktunya di Rammang-Rammang.

Selain komunitas masyarakat lokal, hadirnya aktor media dan akademisi juga berperan dalam memberikan informasi dan publikasi terhadap atraksi, aksesibilitas dan amenitas untuk pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Media berperan aktif selain wadah pertukaran informasi yang terbuka untuk seluruh pihak, mereka berperan dalam memasarkan Rammang-Rammang agar bisa dikenali oleh berbagai pihak sehingga tertarik untuk mengunjunginya. Akademisi sendiri sebagai penasehat memiliki peran yang penting karena saran serta tinjauan yang berbasis ilmiah memberikan ide kepada pengelola untuk lebih kreatif dalam melakukan pengembangan *ecotourism* yang akhirnya desain tersebut memberikan efek bertambahnya pengunjung yang datang berwisata di Rammang-Rammang dan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.

Selain ditinjau dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan *ecotourism*, pelestarian lingkungan juga menjadi indikator yang tak dapat terpisahkan dalam pelaksanaannya. Aspek pelestarian lingkungan ini setidaknya bisa ditinjau dengan bagaimana masyarakat atau *local communities* tidak lagi memandang karst hanya bebatuan semata yang bermuara pada industri ekstraktif melainkan melihat gugusan karst yang ada sebagai sebuah hal yang berharga melebihi nilai materil. Selanjutnya, pelestarian lingkungan ini juga dapat dilihat dengan bagaimana pemanfaatan sumberdaya yang ada tidak digunakan secara berlebihan bahkan berujung pada eksploitasi sumberdaya. Selain itu, aktivitas yang dilakukan dalam wilayah *ecotourism* didalamnya harus tetap mempertahankan keaslian yang ada di tempat tersebut dalam hal ini yang terjadi di Rammang-Rammang.

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan yang menjadi aktor di jaringan implementasi kebijakan, tiap aktor punya kesepemahaman tentang bagaimana alam dan lingkungan harus dilestarikan tanpa terkecuali. Walau demikian, didapatkan beberapa perbedaan perspektif khususnya dalam metode dan cara penerapan dalam menjaga agar alam tetap terjaga kelestariannya. Pada aktor pemerintah, sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pariwisata mereka memiliki bekerjasama dan berkoordinasi dengan banyak pihak di dinas terkait serta *stakeholder* yang mempunyai kewenangan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Rammang-Rammang sebagai wujud pengembangan *ecotourism*. Ini terlihat di sosialisasi dan pelibatan secara partisipatif baik masyarakat lokal maupun pengunjung wisata untuk mengedukasi bahwa gugusan karst bukan hanya bebatuan. Salah satu penggerak ini juga dilaksanakan oleh GenPI Maros dan Dara Daeng (Duta Wisata Maros). Secara legitimasi, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur serta mengawasi pengelolaan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang secara spesifik. Ini sangat diperlukan sebagai payung hukum yang kuat. Edukasi dan negosiasi kepada masyarakat atas konflik kepentingan yang bertentangan satu sama lain pada

pengembangan *ecotourism* rutin dilakukan sehingga berbagai kepentingan tetap terlaksana tanpa harus mengorbankan lingkungan.

Pada komunitas masyarakat lokal juga memiliki peran yang sentral dalam menjalankan fungsi menjaga lingkungan di gugusan karst yang ada di Rammang-Rammang sebagai wujud pelaksanaan pengembangan *ecotourism*. Misalnya Komunitas Anak Sungai yang upaya dalam merawat karst mendapatkan penghargaan dari Kementerian LHK RI dan Kick Andy Heroes. Dengan adanya upaya tersebut, perlindungan atas lingkungan gugusan karst utamanya yang ada di Rammang-Rammang menjadi perhatian dunia dengan ditetapkannya Geopark Maros-Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark di 2023. Bertambahnya status ini juga menutup celah perusakan kawasan karst dan apa yang terkandung di dalamnya khususnya di Rammang-Rammang karena sebagai kawasan yang diakui oleh UNESCO secara langsung kawasan Geopark menjadi kawasan yang sangat dilindungi kelestariannya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari pengembangan *ecotourism* yang mengundang banyak wisatawan untuk datang ke Rammang-Rammang juga membawa kerusakan atas lingkungan walau tidak sebesar industri ekstraktif seperti pertambangan. Salah satu yang bisa dilihat adalah tingkat kebersihan dan kejernihan air sepanjang sungai pute yang menjadi lokasi atraksi wisata di Rammang-Rammang. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Komunitas Masyarakat Lokal dan BP Geopark Maros-Pangkep, hadirnya wisatawan dari berbagai latarbelakang menjadi tantangan tersendiri karena beberapa dari mereka belum memahami tentang pentingnya menjaga keadaan ekologi yang ada di Rammang-Rammang termasuk membuang sampah di tempatnya. Begitu pula hasil pembakaran mesin diesel kapal jolloro' yang perlahan berdampak terhadap ekosistem air di perairan sungai baik hulu hingga ke hilir. Namun, para aktor khususnya Komunitas Anak Sungai, POKDARWIS, BP Geopark Maros-Pangkep dan Media melakukan perannya dengan sumberdaya masing-masing. Komunitas Anak Sungai dengan perannya dalam pelibatan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan limbah, ekologi sungai serta edukasi ke wisatawan, POKDARWIS yang mengelola fasilitas-fasilitas umum agar wisatawan berpartisipasi untuk menjaga lingkungan seperti penyediaan tempat sampah dan BP Geopark Maros-Pangkep yang aktif dalam memberi penyuluhan kelestarian yang bekerjasama dengan berbagai kampus dan peneliti. Ini juga tak lepas dari peran media yang aktif dalam memberitakan pentingnya menjaga lingkungan Rammang-Rammang di masyarakat secara luas sehingga sebelum datang kesana, wisatawan perlahan bisa beradaptasi untuk menjaga kelestarian lingkungan di Rammang-Rammang.

Pelaksanaan fungsi para aktor dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan telah berjalan optimal. Namun, dinamika yang terjadi seperti pola komunikasi antar aktor yang terlibat dalam jaringan perlu untuk lebih memasifkan kerjasama dan kolaborasi sehingga konflik kepentingan dalam

pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bisa diselesaikan. Koordinasi dari para aktor ini membutuhkan ruang dan wadah jaringan yang lebih terbuka bagi semua aktor sehingga keseluruhan kepentingan bisa terlaksana sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing agar tercipta *resource sharing* yang lebih optimal.

Jika ditinjau lebih lanjut dalam analisa pada elemen fungsi di jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, ditemukan hal yang menarik terkait penyaluran akses ke pengambilan keputusan, pertukaran informasi serta kerjasama dalam pembentukan kebijakan. Koordinasi dari para aktor dalam jaringan tidak tercipta secara optimal karena belum adanya wadah jaringan yang dapat memfasilitasi para aktor untuk melakukan komunikasi yang secara berkala menjadi sebuah faktor konflik antar aktor sehingga memerlukan kesepemahaman dan kerjasama setidaknya dalam menciptakan ruang-ruang kolektif untuk menyalurkan informasi satu sama lain yang meliputi semua aktor bukan hanya beberapa aktor saja. Walaupun demikian, secara kordinasi telah dilakukan oleh beberapa aktor yang ada dalam jaringan namun belum cukup dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks pada pengembangan *ecotourism* dengan aktor yang luas dan peran beragam. Jika saja tiap aktor dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bisa melakukan negosiasi untuk pertukaran sumberdaya maupun kinerja yang lebih kooperatif antara satu pihak dan pihak lainnya, peran-peran untuk memenuhi kepentingan masing-masing akan lebih optimal dan mudah untuk tercapai.

Komunitas masyarakat lokal seharusnya bisa memberikan ruang kepercayaan kembali kepada pemerintah dalam melakukan kewenangannya sesuai legitimasi yang diberikan dan pemerintah juga harus memperlihatkan peran secara progresif sehingga apa yang menjadi keresahan masyarakat terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan tidak lagi menimbulkan ketidakpercayaan akan perencanaan serta pelaksanaan program. Para aktor lainnya juga harus berupaya agar pola-pola komunikasi antar aktor yang seringkali mengalami tendensi satu sama lain bisa saling meluruskan dalam negosiasi dan komunikasi. Walau demikian, pelaksanaan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang tetap berjalan dengan segala dinamika yang terjadi sehingga secara analisis ilmiah jika persoalan yang menarik di atas bisa dilakukan maka tentu saja akan lebih memperkuat kesuksesan dari tiap-tiap kepentingan yang ada khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

3.3 Struktur (*Structure*)

Setelah menganalisa elemen aktor dan fungsi dalam jaringan, elemen selanjutnya adalah struktur. Struktur sendiri kerap diartikan sebagai bagaimana pola hubungan para aktor dalam jaringan berjalan. Pada elemen struktur ada beragam unsur penting yang menjadi indikator dalam analisisnya yang berisi jumlah aktor, jenis keanggotaan, pola keterkaitan, intensitas atau kekuatan hubungan, dan hirarki dalam jaringan. Struktur kemudian digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana masalah yang terjadi dan cara mengatasinya melalui identifikasi pada posisi dan hubungan antar aktor dalam menjalankan sebuah regulasi atau kebijakan. Jika

dikonsentrasikan dalam melihat bagaimana struktur jaringan dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, maka secara tidak langsung akan membahas tentang bagaimana tiap aktor melihat posisi dan pola hubungan aktor lain di dalam suatu jaringan dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam wawancara, Bidang Pariwisata Disparpora Kab. Maros turut menjelaskan:

“Dalam program pengembangan ecotourism khususnya di Rammang-Rammang, kami membentuk Pokja yang dibentuk 2021 untuk penilaian asesmen kemarin di 2022 dan 2023 ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Selain itu, kami bekerjasama dengan akademisi, hampir semua perguruan tinggi di Sulawesi Selatan di Makassar itu kita bekerja sama dan sudah ada MoU. Semua tertarik untuk berkontribusi sama-sama di Rammang-Rammang untuk pengembangan wisata disana ,” (Wawancara, 19/7/2024)

Kabid Pariwisata Disparpora Maros menjelaskan terkait struktur dalam menjalankan program-program pengembangan pariwisata di kabupaten Maros khususnya dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) yang dibentuk pada tahun 2021 dalam menghadapi asesmen dan penilaian penetapan UNESCO Global Geopark di tahun 2022. Turut juga disampaikan bahwa selain membentuk satuan tugas secara internal dalam menjalankan program yang dibentuk oleh Bidang Pariwisata, ada aktor yang saling berkolaborasi dalam melaksanakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang yaitu akademisi yang terjalin di hampir semua perguruan tinggi yang ada di Makassar (Poltekpar, Unhas dan Unifa). Kerjasama ini disepakati bersama dalam sebuah MoU untuk melaksanakan kolaborasi serta kemitraan tersebut. Kerja sama ini dipertegas kembali oleh Dosen dan Peneliti Fakultas Kehutanan UNHAS sebagai struktur kerja secara eksternal atau lintas aktor:

“Kalo dilihat dari renstra-renstra aktor yang ada, hilangkan beberapa yang tidak masuk di konteks Rammang-Rammang, seluruh aktor punya renstra dengan tujuan yang hampir sama. Khususnya dalam pendidikan dan penelitian, nah kami melaksanakan hal tersebut. Karna adanya ini kami berkordinasi antara satu aktor dengan aktor lainnya. Kami sebenarnya pada intinya membuat strategi terhadap program-program para dinas agar bisa dilakukan bersama supaya tidak ada baku tumpuk. Karena lebih bagus pengelolaannya lebih bagus saling kerjasama bukan saling duluan-duluan. Saya tidak tau apakah ada MoU atau tidak tapi dengan diikutsertakannya kami dalam program tersebut saya rasa sudah ada penandatanganan melalui pimpinan ,” (Wawancara, 2/8/2024)

Dari penjelasan di atas, keberadaan akademisi dalam kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Disparpora Kab. Maros merupakan jalinan lintas sektor yang mempunyai kewenangan masing-masing dalam melaksanakan program. Dalam artian, akademisi tidak masuk dalam satuan kerja atau kelompok kerja yang dibentuk oleh Bidang Pariwisata Disparpora melainkan hanya sebagai

kemitraan yang berkordinasi untuk menjalankan fungsi dari tiap aktor. Ini juga ditandai bahwa tidak ada agenda yang mengikat/wajib di antara keduanya baik asesmen maupun evaluasi saat melaksanakan kebijakan. Selain hubungan antara pemerintah daerah dan akademisi, hubungan antar aktor dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang juga dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas masyarakat lokal dalam hal ini POKDARWIS. Namun, kemitraan yang dilakukan berbeda dengan yang terjadi pada pola hubungan pemda-akademisi karna hubungan ini terjalin secara internal melalui pokja yang disebutkan di atas. Berikut wawancara POKDARWIS yang menyampaikan hal tersebut:

“Ya kalau diliat ki dari SK, kami masuk dalam struktur pelaksana kepariwisataan yang ada di Maros karna kami di SK sama pak Bupati. Pelaksanaannya juga ada yang secara rutin ada juga yang ada tompi acara, selama berkaitan dengan pariwisata yang ada di Rammang-Rammang pokoknya kita selalu kordinasi sama pemda. Seperti kemarin mi yang pas ada penilaiannya UNESCO disini, kami dilibatkan dan dua arah. Ini kemarin baru-baru rapat POKDARWIS dipanggil sama ibu Wabup untuk bahas pengelolaan di Rammang-Rammang, ” (Wawancara, 20/7/2024)

Dalam wawancara tersebut dipandang bahwa hubungan dan pola keterkaitan yang dibentuk telah tersistematis serta terarah pada aktor yang saling berkaitan dalam hal ini POKDARWIS-BUMDES dan Bidang Pariwisata Disarpورا Maros diidentifikasi dari SK yang terbentuk pada pengangkatan struktur POKDARWIS yang menjadi perpanjangan tangan Disarpورا Maros di tiap desa wisata. Karena memiliki forum bersama, komunikasi yang terbentuk bisa dikatakan terarah antara satu dan yang lainnya. Kedua aktor ini juga menjalankan fungsi masing-masing dengan berbagi kewenangan sehingga implementasi program dapat berjalan. Hubungan kerja sama antar struktur baik internal maupun lintas sektor ini sangat krusial karna berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi tiap aktor dalam melaksanakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Apabila terjadi kekeliruan dalam alur kerja maka akan terjadi konflik antar aktor seperti konflik kepentingan (relasi kuasa) dan resistensi antar perencanaan yang dibuat oleh masing-masing aktor. Ancaman ini kemudian dijabarkan oleh Sekretaris BP Geopark Maros-Pangkep sebagai berikut:

“Menjadi kewenangan kami juga dalam pengembangan-pengembangan yang dilakukan di daerah cakupan geopark adalah bagaimana bisa menyambungkan keinginan antara satu pihak ke pihak lain. Tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan hal yang sekompleks karst ini perlu komunikasi yang kompleks juga ke semua pihak. Dari pengelola geopark sendiri sering kali lakukan sosialisasi ke teman-teman bilang kalau tidak beginiki, tidak sampai ini 10 tahun diliat Rammang-Rammang. Karna sebenarnya komunikasi ji ini jadi persoalan baik masyarakat ke masyarakat maupun pemerintah ke masyarakat,” (Wawancara, 24/7/2024)

Terbentuknya jaringan didasari oleh bagaimana para aktor yang terlibat secara optimal dapat berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain dalam menentukan kepentingannya. Tentu saja pola hubungan ini harus dilaksanakan secara teratur karena akan menjadi aspek penentu apakah kesepakatan dan pertukaran sumberdaya yang telah dilakukan bisa mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks jaringan, struktur dalam menjabarkan pola hubungan aktor tidak bisa dilaksanakan hanya dalam satu atau dua institusi, lembaga atau keterwakilan aktor maupun secara internal melainkan harus melibatkan keseluruhan aktor yang berada dalam sebuah jaringan implementasi kebijakan khususnya dalam pengembangan *ecotourism* yang ada di Rammang-Rammang. Harapan akan struktur yang berjalan optimal ini diujarkan oleh Komunitas Anak Sungai karena menurut mereka ketidakpercayaan antar aktor disebabkan pelibatan yang tidak merata utamanya pada aktor-aktor yang tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah sebagai *leading sector* pada pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang:

“Jadi sebenarnya sederhana, negara kan mengakui pengelolaan sumberdaya yang ada itu bisa dikelola oleh negara, swasta dan masyarakat. Nah cuman politik kata-kata yang dikeluarkan pemerintah banyak dimunculkan seolah-olah kami tidak mampu, masyarakat tidak tahu apa-apa. Dalam hal lain, kita juga sangat sering melihat kegagalan pemerintah dalam merencanakan sesuatu, akhirnya asumsi inisiasi masyarakat pun muncul. Yang bikin ribet sebenarnya hari ini adalah cara berpikir kita diatur sedemikian rupa supaya kita berpikir ribet. Contoh ya, kita menghabiskan sehari penuh menjelaskan ke warga cara bikin meja sementara kalo saya siapkan palu, kayu, gergaji bahkan meja itu akan jadi dalam waktu setengah jam. Kami lebih suka pola-pola yang simpel lah dan ini berbeda pandangan dengan apa yang dilakukan pemerintah, sehingga hubungan antar kita tidak ribet juga menemukan titik temu untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut,” (Wawancara, 29/7/2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Media sebagai aktor yang secara sukarela menjalankan fungsinya dalam jaringan implementasi kebijakan khususnya pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Ketidakjelasan pelaksanaan alur kerja ini disebabkan karena tidak adanya perencanaan atau *masterplan* yang jelas secara visioner para aktor. Selain itu, pelibatan yang tidak merata kepada semua aktor khususnya pola hubungan bersifat horizontal belum intens. Jurnalis Mongabay.id turut menjelaskan terkait hal tersebut:

“Meliput kondisi Rammang-Rammang dilakukan secara sukarela karena bentuk kepedulian lingkungan yang menjadi dasar media kami berjalan. Kompleksnya masalah sebenarnya didasari oleh baik pemerintah maupun masyarakat tidak memiliki masterplan sebagai pegangan pelaksanaan secara jangka panjang. Kalau ini diperbaiki dan semuanya kerjasama saya rasa masalah-masalah yang hadir palingan hanya miss komunikasi dan itu tidak berefek sama sekali dalam pengelolaan,” (Wawancara, 24/7/2024)

Jika dilihat dalam wawancara informan di atas, dalam implementasi jaringan kebijakan sangat dibutuhkan struktur yang dapat diartikan sebagai pola kordinasi serta kondisi hubungan sehingga melahirkan alur kerja yang tersistematis dalam pengembangan *ecotourism* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Rammang-Rammang. Optimalnya hal tersebut akan berefek pada pola hubungan antar aktor yang berkaitan satu sama lain apakah jelas maupun tidak jelas. Kompleksnya hubungan antar aktor dan struktur ini dalam karakteristik jaringan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 3 Struktur Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang

Aktor	Ukuran Jaringan	Jenis Keanggotaan	Pola Keterkaitan	Intensitas Hubungan	Jenis Kordinasi
Pemerintah Daerah	Banyak	Wajib	Teratur	Tidak Intens	Hirarkis
Kelompok Masyarakat	Sedikit	Sukarela	Belum Teratur	Tidak Intens	Horizontal
Akademisi	Banyak	Wajib	Teratur	Tidak Intens	Horizontal
Badan Usaha	Sedikit	Wajib	Teratur	Tidak Intens	Hirarkis
Media	Banyak	Sukarela	Belum Teratur	Tidak Intens	Horizontal

Sumber: Hasil Wawancara, 2024

Perhatian pada struktur jaringan dalam melakukan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Adanya perbedaan terhadap jumlah aktor yang terlibat dari para aktor menunjukkan ketidakseimbangan dalam jaringan. Aktor seperti Kelompok masyarakat dan badan usaha perlu diperluas keterlibatannya dalam pelaksanaan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang apalagi kedua aktor ini memiliki peran yang krusial karena bersentuhan langsung dengan indikator yang mempengaruhi apakah pengembangan *ecotourism* berjalan dengan optimal atau sebaliknya. Semakin banyak ruang pelibatan yang diberikan oleh kedua aktor ini maka pengembangan *ecotourism* akan lebih tersistematis dan menambah manfaat bagi implementasi kebijakan yang ada. Pemda dalam fungsinya bertanggungjawab

atas kebijakan pengembangan *ecotourism* melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Ini didasari karena intensitas wadah dalam melakukan hubungan antar aktor minim dilakukan khususnya pada pembahasan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Kelompok masyarakat dan media jarang dilibatkan ke dalam forum pembahasan sehingga intensitas pelibatannya sangat minim. Biasanya para aktor ini dilibatkan jika aktor-aktor lainnya memiliki kepentingan yang mengharuskan keterlibatan mereka seperti asesmen dari aktor di luar jaringan maupun perihal lainnya. Ini berdampak kepada rumitnya mempertemukan kepentingan aktor pemda dan kelompok masyarakat dalam suatu hubungan dan komunikasi sehingga pengembangan *ecotourism* terhambat.

Salah satu yang menjadi contoh akibat dari faktor tersebut terlihat saat program pemerintah daerah tak sejalan dengan kebutuhan maupun kesepakatan sosial yang menjadi komitmen mereka adalah masyarakat pada akhirnya memilih berinisiatif walau tak sejalan dengan alur birokrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan pariwisata. Namun, hal ini pada akhirnya selesai dengan sendirinya karena secara tidak langsung para aktor yang tidak sejalan saling bertukar sumberdaya dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing. Dalam analisa yang lebih lanjut, interaksi yang dilakukan oleh perseorangan dan kelembagaan sudah dilakukan. Ini diukur dengan adanya interaksi dan durasi interaksi yang dilakukan oleh para aktor dalam bentuk pertemuan formal maupun informal. Pada pemerintah daerah, pertemuan formal sering dilakukan namun tidak secara luas sehingga para aktor dalam jaringan secara keseluruhan bisa hadir. Dalam pembahasan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, biasanya pemerintah daerah hanya memanggil aktor yang terlibat hubungan formal secara langsung ataupun ada ikatan kerjasama secara resmi contohnya pertemuan Wabup Maros dan OPD terkait untuk monitoring evaluasi kemudian memanggil aktor yang dianggap perlu serta sejalan seperti POKDARWIS dan Kepala Desa Salenrang untuk perpanjangan kewenangan di tingkat desa dan pengelolaan. Komunitas masyarakat yang secara jenis kordinasi tidak berada dalam hirarki kurang dilibatkan begitupula para aktor lainnya. Namun, pada pertemuan non formal para aktor yang berada dalam jaringan ini menjalin hubungan sesuai kepentingan masing-masing.

Selain durasi interaksi lembaga pemerintah, interaksi non pemerintah dilakukan atas kepentingan masing-masing. Biasanya interaksi dilakukan karena ada kerjasama yang mengharuskan *brand positioning* atas kolaborasi antar aktor bisa tercapai. Tidak ada agenda rutin dalam melakukan kordinasi terkait pengembangan *ecotourism* namun pelibatan biasanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan diluar konteks kepariwisataan seperti diskusi ilmiah dan sebagainya.

Hasil analisis data yang ditemukan di lapangan dalam unsur struktur di elemen jaringan ini menunjukkan para aktor tidak terhubung oleh banyak aktor yang terlibat dalam jaringan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang dan masih mementingkan tujuan masing-masing. Ini dapat ditinjau ketika para aktor dalam jaringan tidak intens dalam melakukan hubungan baik secara frekuensi maupun durasi antar satu sama lain dalam melakukan pertukaran sumberdaya yang

dimiliki dari masing-masing peran. Para aktor hanya berfokus pada kewenangan masing-masing serta kepentingannya dan tak meninjau kepentingan aktor lainnya walaupun sebenarnya ada kesamaan mendasar sehingga memunculkan perbedaan perspektif yang bersifat kompetitif satu sama lain. Misalnya komunitas masyarakat lokal yang tetap teguh dalam menjalankan kepercayaannya terhadap pranata lokal serta kesepakatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan akhirnya tak jarang kurang melakukan konsolidasi serta komunikasi dua arah terhadap aktor lainnya seperti pemerintah daerah yang berwenang.

Dalam hasil analisis data yang ditemukan di lapangan, adanya keanggotaan yang tumpang tindih dalam struktur menyebabkan risiko penyelewengan kepentingan yang sarat akan terpusat pada satu aktor saja. Ini didapatkan pada aktor POKDARWIS dan BUMDES Appakabaji yang anggota dalam organisasi merupakan orang-orang yang sama sehingga terjadi mobilitas personel yang tidak luas. Seharusnya agar pengembangan *ecotourism* dapat dilaksanakan secara lebih efektif, struktur dari kedua aktor ini perlu dibedakan karna pada fungsi serta perannya berbeda. Jika sentralisasi dari aktor ini tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan risiko monopoli dan relasi kuasa atas peran aktor lainnya yang terdapat di jaringan.

3.4 Pelembagaan (*Institutionalization*)

Elemen jaringan yang mengarahkan untuk mengetahui bagaimana karakter formal dari struktur jaringan serta stabilitasnya adalah pelembagaan. Indikator pelembagaan diidentifikasi dengan bagaimana formalitas para aktor yang terkait dalam jaringan. Ini bisa dimaknai bagaimana legitimasi serta aturan secara formal mengikat para aktor dalam pelembagaan. Pada jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, pelembagaan ini terdapat dalam keputusan bupati, kepala desa dan gubernur di tiap unit pelaksana para aktor terkait. Ini disampaikan oleh Kabid Pariwisata Disparpora Kabupaten Maros dalam wawancara:

“Pokja yang saya tadi sampaikan itu ketuanya ibu Wabup. Nah, pokja ini sendiri bekerja sebenarnya secara luas untuk pengelolaan kawasan UGG, sehingga Rammang-Rammang juga sudah masuk di dalamnya. Kalo SK pasti ada ya karna ini langsung di ketuai oleh ibu Wabup. Yang terdiri dari SKPD di pemda maros, Pokdarwis, macam-macam dan itu selalu berkordinasi karna kepentingan bersama yaitu pengakuan UNESCO,” (Wawancara, 19/7/2024)

Dalam wawancara ini dijelaskan bahwa ada landasan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk membentuk Pokja untuk mengelola kawasan UUG. Dalam artian, pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang juga masuk di dalamnya dan ini menjadi dasar pelaksanaan jaringan yang terbentuk dalam mengimplementasi kebijakan berkaitan dengan pariwisata dan pelestarian lingkungan. Keterlibatan ini juga dibenarkan oleh POKDARWIS dalam wawancara disampaikan sebagai berikut:

“Kami baru saja rapat dengan ibu Wabup untuk membahas tentang pengelolaan UGG. Tentu POKDARWIS Rammang-Rammang juga turut serta makanya kami diundang untuk mengikuti pembahasan,” (Wawancara, 20/7/2024)

POKDARWIS sebagai anggota pelaksana dalam pengembangan *ecotourism* yang tersusun atas pokja yang telah disusun oleh Wakil Bupati sebagai ketua Pokja UGG. Hal ini memberikan konfirmasi bahwa pelaksanaan pengembangan *ecotourism* didasari oleh Pokja UGG dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun, pelaksanaan pokja ini tidak melibatkan banyak aktor yang seharusnya ikut dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Ini disampaikan oleh Komunitas Anak Sungai dalam wawancara sebagai berikut:

“Pokja itu hadir kan sesuai kemauan dari pemerintah saja tanpa lihat seluruh lapisan yang menjalankan pengembangan wisata yang ada. Harusnya pelibatan itu tercipta dua arah kepada seluruh stakeholder,” (Wawancara, 29/7/2024)

Perbedaan pendapat ini juga disampaikan oleh Jurnalis Mongabay.id bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh multiaktor diluar pemerintah khususnya dalam satuan tugas atau hubungan kemitraan tidak pernah disampaikan kepada awak media secara formal dalam bentuk MoU maupun keputusan resmi lainnya. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Kalaupun ada pokja yang hadir nantinya, sebenarnya perlu tidak perlu untuk dijadikan satu kesatuan dalam struktural. Pun jika ada, nantinya MoU itu sebagai penjelasan saja secara formalitas bahwa ada kerjasama yang terjalin untuk menyebarkan informasi seputar Rammang-Rammang. Tapi kan selama ini media meliput kebanyakan sukarela saja karna bisa jadi bahan berita, berbeda dengan Mongabay output dari liputan tersebut dirangkumkan menjadi literasi yang bisa dibaca berbentuk buku,” (Wawancara, 24/7/2024)

Dalam pendapat ini bisa ditinjau bahwa pokja ini bukan landasan utama kerjasama yang dilakukan oleh para aktor yang terkait dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Walau demikian, pokja ini hadir sebagai satuan kerja yang bersifat formal dan dilandasi payung hukum yang kuat. Sehingga jika kepentingan-kepentingan yang akan hadir dalam pengembangan *ecotourism* bisa divalidasi secara formal dan legal untuk melindungi kelestarian alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini disampaikan oleh BP Geopark Maros-Pangkep sebagai aktor yang kelembagaannya sentral dalam pengelolaan kawasan UGG untuk berkordinasi dengan para aktor sebagai berikut:

“Saya rasa MoU dan kesepakatan untuk menjaga lingkungan itu hanya bagian dari formalitas saja. Secara konteks kan walau tidak terlibat langsung dalam Pokja tersebut, semua aktor yang terkait juga tetap menjalankan perannya masing-masing untuk mengembangkan Rammang-Rammang. MoU itu kan hadir karna ada kebutuhan bersama dari yang terlibat sehingga ada kepentingan yang akan dibuat. Kalau tidak juga tetap jalan konservasi yang ada di Rammang-Rammang. Hanya saja, kalau pun ada, kasih masuk

saja semua supaya tidak ada lagi yang merasa tidak dilibatkan. Komunikasi saja sebenarnya,” (Wawancara, 24/7/2024)

Penjelasan dari informan ini menjelaskan bahwa pokja yang dibuat ini memang mengikat secara formal, namun ada dan tidak adanya Pokja ini tidak mempengaruhi para aktor untuk mengembangkan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Keputusan itu hadir secara formal pada dasarnya hanya untuk bentuk pertanggungjawaban administratif oleh institusi terkait khususnya dalam menjalankan program pemerintah daerah. Hanya saja, alangkah baiknya jika pelibatan tersebut harus menyeluruh dan tidak terbatas kepada aktor yang sepemahaman. Pelaksanaan peran dari tiap aktor akan tetap dijalankan dengan memegang prinsip *ecotourism* karna melihat perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kesepakatan sosial yang dilakukan secara bersama-sama.

Pelembagaan dalam jaringan ini perlu dilakukan sehingga para aktor yang tergabung dalam jaringan memiliki kesetaraan atas kewenangan yang ada untuk melaksanakan pengembangan *ecotourism* demi mencapai tujuan yang diinginkan. Pelembagaan berkaitan dengan aturan formal dan bersifat mengikat pada para aktor dalam jaringan yang melakukan hubungan kerja. Pelembagaan dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* ini dijabarkan melalui Perda Kabupaten Maros No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Maros Tahun 2022-2025 dan dijabarkan kembali melalui Perbub Nomor 774/KPTS/556/IV/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Geopark Maros-Pangkep Kabupaten Maros Tahun 2022.

Lebih rinci ke Kelompok Kerja Geopark Maros-Pangkep, berikut para aktor yang terlibat dalam pengembangan *ecotourism* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam peraturan bupati yaitu:

Tabel 3. 4 Pelembagaan Jaringan Pada Aktor Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Ecotourism di Rammang-Rammang

No	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Kelompok Kerja
1.	Wakil Bupati Kabupaten Maros	Ketua Pokja Pengelolaan UGG Maros-Pangkep
1.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros	Anggota Pelaksana
2.	Dinas PU Kabupaten Maros	Anggota Pelaksana
3.	Dinas LHK Kabupaten Maros	Anggota Pelaksana
4.	BP Geopark Maros Pangkep	Anggota Pelaksana
4.	POKDARWIS Rammang-Rammang	Anggota Pelaksana (Wilayah Rammang-Rammang)

5.	Pemerintah Desa Salenrang, BUMDES Appakabaji	Anggota Pelaksana
6.	Perguruan Tinggi	Penasehat

Sumber: Perbub Nomor 774/KPTS/556/IV/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Geopark Maros-Pangkep Kabupaten Maros Tahun 2022

Hadirnya Perbub ini sebagai dasar untuk menjalankan satuan tugas untuk pengelolaan Geopark Maros-Pangkep dalam hal ini pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang walau pada realita yang terjadi di lapangan tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan karena hanya sebatas formalitas administratif semata. Beberapa aktor yang harusnya dimasukkan dalam pokja tersebut akhirnya tidak dilibatkan secara formal tapi masih menjalankan perannya sebagai aktor yang terkait dalam jaringan tersebut. Keberadaan pokja ini hanya formalitas administratif sebagai susunan tugas untuk menghadapi asesmen dan kelengkapan penilaian UGG.

Hasil analisis dari elemen pelembagaan ini ditemukan bahwa karakter formal struktur jaringan yang ada dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang belum berjalan dengan stabil karena secara formalitas terbentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administratif dari kepentingan beberapa aktor seperti pemerintah daerah dalam menghadapi asesmen dan penilaian UNESCO Global Geopark. Seharusnya pokja yang menjadi karakter formal dari struktur jaringan bisa dioptimalkan secara tersistematis baik dari segi peran serta pelembagaan yang lebih merangkul banyak pihak. Formalitas dalam runutan pelembagaan ini harusnya bisa digunakan sebagai penggabungan sumberdaya yang diakui oleh seluruh aktor sehingga para aktor yang terhubung dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* memiliki kewajiban bersama dalam pelaksanaannya untuk berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

3.5 Aturan Bertindak (*Rule of Conduct*)

Aktor harus terlibat dalam melaksanakan kebijakan dalam suatu jaringan. Faktor yang dapat mengundang keterlibatan tersebut biasa diartikan sebagai aturan bertindak dalam sebuah jaringan. Adanya kesepakatan dan kebiasaan dari interaksi yang hadir antara aktor dalam jaringan juga bisa dimaknai sebagai aturan bertindak. Dalam jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, aturan bertindak terkait dengan pemicu aktor untuk terlibat. Wawancara bersama Kabid Pariwisata Disparpora Maros menyampaikan hal tersebut:

“Pedoman kami tentu saja kebijakan dan regulasi untuk menjalankan tugas. Sehingga kewenangan kami sudah jelas dan merupakan kewajiban yang harus kami jalankan. Selain itu kami bekerjasama dan kolaborasi dengan banyak pihak. Teknis pelaksanaan dilakukan oleh Pokja itu tadi untuk pengelolaan di UGG baik secara terikat maupun tidak terikat langsung, ini

meliputi pengelolaan dan pengembangan ecotourism di Rammang-Rammang,” (Wawancara, 19/7/2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan keterlibatan pemerintah dalam jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang merupakan kewajiban yang telah diatur dalam kebijakan yang mengatur khususnya dalam program-program serta teknis pelaksana berupa Pokja yang dibentuk secara luas untuk pengelolaan kawasan UGG. POKDARWIS Rammang-Rammang yang terlibat dalam Perbub Maros tentang Pokja Geopark Maros-Pangkep membenarkan hal tersebut dalam wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“POKDARWIS kan ini bagian dari masyarakat, pengurusnya juga orang sini tonji diangkat. Tujuannya untuk efektif pengelolaan, karna kalau ditanya siapa yang paling tau soal Rammang-Rammang ya pasti jawabannya kami soalnya kami lahir dan besar disini. Bahkan sebelum dikenal ini Rammang-Rammang masih tidak ada kehidupan diliat ada memang mki disini. Jadi sudah tepat kalau pemerintah melibatkan kami dalam pengembangan wisata disini apalagi ekowisata konteksnya. Kalau di SK tongki juga kan lebih enak, lebih jelas saja lah apa kewenangannya kami apa pemerintah apa swasta dan yang lain. Walaupun ya biar ada tidak ada SK tetap jki pasti rawat ini karst di Rammang-Rammang karna rumah ta memang disini, ” (Wawancara, 20/7/2024)

Penyampaian yang dilakukan oleh POKDARWIS bahwa pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang merupakan kewenangan yang merepresentasikan hubungan kerja yang terjalin dalam Pokja Pengelola Geopark Maros-Pangkep di wilayah Rammang-Rammang. Walau demikian, ada atau tanpa keputusan formal yang mengatur tersebut tidak mengurangi optimalnya pengembangan *ecotourism* yang dilakukan oleh POKDARWIS sebagai kelompok masyarakat yang secara formal mengelola pariwisata di Rammang-Rammang. Walau demikian, adanya pelibatan secara formal tersebut menambah rasa tanggungjawab dalam bentuk aktualisasi dan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah. Pelibatan ini pun bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong anggaran pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang dalam rangka meningkatkan kualitas atraksi, aksesibilitas serta aminitas yang akan berefek pada pariwisata yang imbasnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat bahkan pelestarian lingkungan yang lebih memadai. Ini juga disampaikan oleh Komunitas Anak Sungai, walaupun terdapat perbedaan pendapat dengan cara yang dilakukan pemerintah, menurut koordinator Komunitas Anak Sungai apa yang dilakukan pemerintah daerah sisa merangkul masyarakat yang lebih luas bukan saja di ranah formal melainkan secara non formal. Ini disampaikan saat wawancara:

“Kami bilang sebenarnya bukan itu yang kami butuhkan, agak sulit diterima di akal bagaimana anda mengajari kami orang mengeyam tikar, lahirnya

pengetahuan itu datangnya dari kami, jadi agak susah. Kami tidak bermasalah di pengetahuan, kami tau. Masalah kami di fasilitas, kalau jadi produknya mau dijual kemana, kan begitu toh. Lalu kalo produknya mau di finishing secara sempurna sesuai standar alatnya mana, karna tidak sebanding dengan alat yang ada sekarang. Bukan berarti kami tidak tau bikin. Jangan sampai Rammang-Rammang ini beralih menjadi industri pariwisata, kenapa ada konsep CBT yang dijalankan karna ada ketidakpercayaan ke pemerintah. Bedanya, kami melakukan pengelolaan ini tidak menitikberatkan pada satu tempat, dia langsung terdistribusi secara otomatis dengan tingkat kinerja masing-masing,” (Wawancara, 29/7/2024)

Berdasarkan wawancara di atas, metode pemerintah daerah untuk memasukkan POKDARWIS ke dalam Pokja Geopark Maros-Pangkep sebagai anggota pelaksana secara formal bukan hal tepat dalam melibatkan masyarakat dalam mengelola pariwisata di Rammang-Rammang jika prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada. Jika hal tersebut bisa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas, maka itu bisa menjadi peluang namun jika hanya berbicara dalam tataran penyuluhan serta sosialisasi semata untuk pemberdayaan masyarakat, hal tersebut tidak dibutuhkan karna bukan menjadi persoalan masyarakat. Mekanisme ini yang seharusnya diserap oleh pemerintah daerah agar pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bisa lebih optimal. Namun, BP Geopark Maros-Pangkep yang juga sebagai aktor utama dalam jaringan implementasi kebijakan pengelolaan UGG memberikan masukan bahwa mekanisme birokrasi tidak sesederhana yang kadang dipikirkan oleh masyarakat, ada proses-proses administratif serta persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan program dengan melihat sumberdaya yang tersedia. Ia juga turut menyampaikan bahwa perbedaan perspektif ini muncul akibat pemerintah tidak menyeluruh dalam melakukan rangkulan sehingga pengembangan *ecotourism* seringkali mendapatkan resistensi dari aktor-aktor lainnya. Berikut yang disampaikan dalam wawancara bersama Sekretaris BP Geopark Maros-Pangkep:

“Dalam satu payung pariwisata juga toh antara POKDARWIS dan Pemerintah Dinas Pariwisata kadang tidak anui bro, jadi apa di” kita lagi datang disitu, begini solusinya kalo kau mau terima ya terserah mi karna itu mi dianggap baik, karna kepentingan sebenarnya kan bagaimana ini Geopark khususnya Rammang-Rammang bisa terjaga dengan baik yang diatur sama UNESCO karna diamanahkan beberapa rekomendasi untuk divalidasi ulang. Malu malu kita akhirnya sama UNESCO pas direvalidasi ulang dan gara-gara konflik internal seperti itu saja dicabut statusnya kita. Padahal harusnya dengan hadirnya sertifikat UNESCO ini bisa mki kemana-mana bukan mi lagi dipusingkan dengan hal semacam ini. Pemerintah juga harus merangkul bukan memukul mundur masyarakat yang notabene sudah jauh makin jauh akhirnya, di satu sisi juga masyarakat harus mulai paham bahwa kerja-kerja birokrasi ini sudah ada SOP nya dilakukan dan sudah disosialisasikan ke semua pihak. Jadi kalau keduanya tidak mau saling menerima, yah sudahmi kalau begitu, di akhir kita lihat hasilnya. Tapi kan bukan itu kita harapkan toh,” (Wawancara, 24/7/2024)

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa keterlibatan para aktor didasari pada tujuan yang sama dalam mengembangkan *ecotourism* sehingga seluruh pihak bisa terpenuhi kepentingannya. Hanya saja, perbedaan dalam mengambil metode pelaksanaan masing-masing yang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Walau demikian, masalah ini tidak dianggap sebagai suatu hal yang krusial oleh semua aktor yang tergabung dalam jaringan dan menyatakan itu semua sebatas dinamika yang terjadi atas hubungan dan peran masing-masing ketika dipertemukan dalam satu wadah tujuan yang sama. Pemahaman akan peran masing-masing aktor sendiri menjadi hal yang kadang terlupakan sehingga ada hal yang berbeda walaupun sebenarnya memiliki kepentingan yang relatif sama. Semua bersepakat jika ada yang menjadi masalah pada pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, maka itu menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara bersama-sama dalam jaringan aktor. Sejauh ini, masalah yang hadir hanya permasalahan komunikasi dan ego sektoral yang masih sulit dipertemukan sehingga membutuhkan wadah serta forum komunikasi yang lebih intens. Ini senada dengan yang disampaikan oleh Dosen dan Peneliti Fakultas Kehutanan UNHAS dalam wawancara berikut:

“Mau dipertemukan memang itu masyarakat dengan pemerintah tetapi berbicara itu juga tidak bisa orang disitu saja dan itu-itu saja, harus dilakukan secara lebih menyeluruh kalau perlu dari hulu ke hilir bukan berbicara masyarakat yang di tengah saja. Ini kan jika diambil kesimpulannya bukan hanya berbicara kelompok masyarakat yang banyak disebut-sebut orang yang mau dipertemukan kepentingannya, tapi itu yang saya bilang tadi hulu ke hilir. Dan kalau komunikasi-komunikasi juga harusnya sudah sering dalam forum-forum yang ada, musrenbang, undangan-undangan panelis dan lainnya. Cuman memang, yah lagi-lagi itu urusan pribadi masing-masing, skala prioritas ji lagi masalahnya. Solusinya sudah kita bantu buat kemarin, mempertemukan dan membiarkan mereka menentukan skala prioritasnya masing-masing di satu FGD dengan kuisisioner langsung ke semua pemangku kepentingan untuk rekomendasi roadmap, menyamakan persepsi untuk skala prioritas. Itu bisa dilakukan secara akademisi,”
(Wawancara, 2/8/2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyelesaikan masalah komunikasi dan relasi kuasa yang hadir akibat perbedaan kepentingan antar aktor membutuhkan ruang yang mempertemukan skala prioritas dengan pembahasan secara bersama-sama untuk pembentukan *masterplan* atau *roadmap* yang dihasilkan dari kuisisioner dalam FGD bersama masing-masing aktor dengan mengkanalisasi opsi kepentingan yang ada sehingga tidak mengedepankan hanya pada masalah pribadi masing-masing. Namun, *masterplan* ini merupakan solusi yang baru saja dirampungkan untuk diimplementasi dan belum bisa dilihat sebagai metode penyelesaian masalah yang konkrit. Namun, dalam melihat apa sebenarnya masalah, kepentingan, skala prioritas, mekanisme dan perspektif dari para aktor upaya ini telah optimal dilakukan karena sebelumnya metode ini tidak pernah dilakukan oleh para aktor manapun bahkan pemerintah yang seharusnya menjadi wadah jaringan. *Jurnal*is Mongabay.id

juga turut berkomentar dan memberikan pembenaran atas hal tersebut khususnya dalam pembahasan bahwa tiap aktor harus lebih membuka diri satu sama lain karena beberapa pencapaian yang telah diraih sekarang merupakan satu peluang yang sangat langka sehingga perlu untuk dimanfaatkan sebaik mungkin bukan sebaliknya mengeluarkan fokus kepada permasalahan internal yang tak kunjung usai. Berikut wawancara yang dilakukan bersama Jurnalis Mongabay.id:

“Menyikapi permasalahan tumpang tindih ini kan sebenarnya bisa dipercepat selesainya kalo semua yang terlibat bisa lebih terbuka satu sama lain. Saya memahami bahwa ada timbul ketidakpercayaan antara satu sama lain baik pemerintah maupun masyarakat, tapi namanya dinamika sosial pasti ada lah dan tergantung bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Sayang sekali jika kesempatan UNESCO Global Geopark ini tidak didapatkan lagi jika saat asesor datang lalu mengetahui hal ini. Namun, saya yakin bahwa tiap-tiap aktor bisa membuka diri. Tapi tentu hal-hal yang mengundang sentimen ini perlu dibicarakan lebih lanjut seperti kedepannya tujuan dari pengembangan ecotourism dalam lingkup UGG ini dominannya apa, apakah infrastruktur, pariwisata atau konservasi, mungkin itu yang ketika dibicarakan baik-baik baru ditemukan ruang persamaan yang saling menguntungkan.” (Wawancara, 24/7/2024)

Penegasan media di atas menjelaskan bahwa adanya permasalahan komunikasi, konflik kepentingan, relasi kuasa dan resistensi antara satu aktor dan aktor lainnya bisa mempengaruhi peluang-peluang yang telah diraih selama ini bisa rusak bahkan tidak lagi didapatkan. Solusi yang kemudian lahir seperti yang diungkapkan aktor lainnya bahwa komunikasi untuk menemukan persamaan atas hal yang dianggap sebuah prinsip di latar belakang aktor masing-masing harus segera dipercepat karena dengan itu manfaat serta peluang yang hadir akan semakin banyak diperoleh. Tentu saja, wadah jaringan kembali dipertegas untuk hadir dalam menengahi masalah komunikasi yang kian kompleks di masyarakat sehingga tak menimbulkan problematika lebih rumit di masa yang akan datang.

Aktor dalam implementasi kebijakan memiliki ruang keterlibatannya masing-masing. Aktor pemerintah terlibat dalam menjalankan tanggungjawab sesuai regulasi dan kebijakan yang mengikat untuk melakukan program pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Walau demikian, perlu diketahui bahwa pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bukanlah fokus utama pemerintah daerah dalam menjalankan program melainkan pengelolaan kawasan UGG yang sudah tercakup di dalamnya. Perbedaan pendapat kemudian disampaikan oleh para aktor lainnya diluar pemerintah baik Komunitas Masyarakat Lokal dalam hal ini POKDARWIS dan Komunitas Anak Sungai serta Media. Para aktor ini menganggap bahwa keterlibatannya dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bukan didasari oleh kewajiban yang mengikat secara formal melainkan karena faktor lainnya seperti latarbelakang secara historis yang mengindikasikan ada kecintaan atas rumah dan ruang masyarakat lokal karena telah bermukim sebelum adanya aktivitas yang sekarang dilakukan seperti pariwisata dan

sebagainya sehingga secara tidak langsung para aktor ini memiliki rasa kepedulian dan kepemilikan atas Rammang-Rammang baik secara pelestarian lingkungan maupun upaya meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Aktor seperti media juga terlibat dalam pengembangan *ecotourism* karena kepedulian pada faktor ekologi yang menjadi sebuah *main issue* di dapur redaksi Mongabay.id. Ini didasari oleh latarbelakang para jurnalis yang tergabung di Mongabay.id merupakan aktivis lingkungan yang jejaringnya telah mencapai internasional. Selain itu, aktor yang terlibat dalam upaya pengembangan *ecotourism* dilakukan oleh Pemerintah Desa Salenrang dalam hal ini BUMDES Appakabaji. Keterlibatan ini sama halnya dengan keterlibatan pemerintah daerah yang didasari atas kewajiban atas kebijakan yang mengatur dalam pengelolaan pariwisata di Rammang-Rammang. Akademisi sendiri berada dalam titik yang mengambil adaptasi keterlibatan keduanya yaitu didasari karena kewajiban atas kemitraan yang dijalin serta kepedulian ekologi terhadap UNESCO Global Geopark khususnya pada wilayah Rammang-Rammang.

Pola yang terjadi antar aktor dalam mengatasi permasalahan yang hadir pun sangat beragam karena didasari atas persepsi aktor dalam melihat upaya pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang sendiri. Jika ditinjau secara luas, para aktor dalam jaringan mengedepankan metode masing-masing dan tidak ingin membuka diri satu sama lain baik untuk berkomunikasi untuk menyatukan skala prioritas hingga pengambilan alternatif pada kepentingan-kepentingan yang hadir. Hal ini kemudian diidentifikasi secara dalam melalui wawancara bersama para informan dan didapati bahwa para aktor yang terlibat menyepakati beberapa hal selama persamaan dalam prinsip masing-masing ditemukan kesamaan, jika tidak maka perbedaan secara signifikan menimbulkan resistensi yang solid diantara keduanya. Yang menarik adalah bagaimana aktor-aktor seperti akademisi, BP Geopark Maros-Pangkep dan Media memberikan afirmasi positif kepada aktor yang kadang berselisih paham sehingga bisa menerima beberapa perbedaan dengan kepentingan yang harus bermanfaat bagi satu sama lain. Dari semua aktor, hal yang di sepakati secara tidak sadar bahkan terjadi aktivitas berbagi sumberdaya walau memiliki perbedaan dalam upaya yang dilakukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan selalu menjadi akhir dari perdebatan-perdebatan yang tentu ini menjadi titik temu dari resistensi antar aktor sekaligus solusi yang lahir dari keduanya.

Dalam analisis data yang ditemukan di lapangan, adanya perselisihan ideologis yang terjadi khususnya pada aktor pemerintah dan komunitas masyarakat lokal dalam hal ini komunitas anak sungai menjadi sebuah poin yang belum mendapatkan titik terang. Secara ideologis, pandangan kedua aktor ini didasari pada kepentingan pragmatisme rasionalis dalam penerapan pengelolaan kepariwisataan yang berhubungan dengan konsep ekonomi secara makro maupun mikro. Jika ditinjau dari kepentingannya, pemerintah desa dan pemerintah daerah menginginkan agar penarikan retribusi serta kuantitas pengunjung yang datang di Rammang-Rammang bisa ditarik setinggi-tingginya dari beberapa hal yang telah dirumuskan

dalam peraturan desa seperti parkir dan fasilitas di destinasi wisata yang ada. Sumberdaya yang ditarik tersebut akhirnya dikumpulkan dalam satu pengelola lalu didistribusikan sesuai dengan kinerja berupa gaji pengelola dan biaya operasional. Sedangkan menurut komunitas masyarakat lokal dalam hal ini komunitas anak sungai berpandangan bahwa perputaran uang tidak boleh dilakukan secara tersentralisasi oleh satu titik melainkan membiarkan perputaran tersebut terlaksana secara natural sesuai kinerja dari tiap pihak penyedia jasa yang notabene adalah masyarakat setempat. Perselisihan ideologis ini secara sederhana adalah penggunaan persepsi antara penerapan ekonomi mikro yang dilakukan oleh pemerintah dan penerapan ekonomi makro yang diinginkan oleh komunitas masyarakat lokal yang mengelola Rammang-Rammang.

Seharusnya dalam perselisihan tersebut dilakukan konsensus secara berkala kepada para aktor yang terlibat dan diberikan skala prioritas dalam indikator yang disepakati bersama-sama. Diharapkan hasil dari konsensus tersebut berupa *focus group discussion* maupun survei terkait kepentingan masing-masing yang dianalisis oleh indikator skala prioritas yang sama bisa melahirkan alternatif metode yang memenuhi kepentingan para aktor yang terkait seperti pemerintah serta komunitas masyarakat lokal. Optimalisasi atas permasalahan diperlukan agar pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang bisa berjalan efektif sehingga kepentingan atas publik bisa sama-sama menjadi tujuan. Jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang ditinjau masih belum terbuka dalam melihat berbagai perspektif dari para aktor dan masih memunculkan ego-sektoral di tiap kepentingannya. Hal ini membutuhkan komunikasi yang serius serta berkala untuk mengatasi dan memberi solusi walaupun para aktor melihat secara konteks hal ini hanya dinamika sosial karna saat ini Rammang-Rammang telah berada di dalam kawasan UNESCO Global Geopark yang keberadaannya dipantau oleh UNESCO. Sehingga bisa dikatakan bahwa variasi interaksi dari para aktor condong kepada resistensi antara satu dan lainnya.

3.6 Hubungan Kekuasaan (*Power Relations*)

Elemen krusial untuk dibahas dalam konteks jaringan kebijakan yang menunjukkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) adalah hubungan kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini dimaknai sebagai pendistribusian sumberdaya dan kebutuhan para aktor. Dalam jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* dalam meningkatkan kesejahteraan serta pelestarian lingkungan di Rammang-Rammang, hubungan kekuasaan terindikasi atas pertukaran informasi dan sumberdaya.

Aktor pemerintah dalam hal ini Disparpora Maros, Disbudpar Sulsel dalam hal ini BP Geopark Maros-Pangkep, DPRD Sulsel serta Pemerintah Desa Salenrang berkordinasi dalam perumusan serta pengimplementasian kebijakan sesuai peran dan fungsi masing-masing yang terjabarkan dalam masing-masing regulasi serta posisi. Disparpora Maros saat melaksanakan kewenangannya akhirnya membentuk sebuah kelompok kerja (Pokja) Pengelolaan Geopark Maros-Pangkep untuk melaksanakan kewenangannya secara teknis dengan melibatkan berbagai aktor

sebagai perpanjangan tangan secara lebih luas dan terorganisir. Walau demikian, dalam pengembangan *ecotourism* yang masuk dalam agenda UNESCO Global Geopark, pemerintah daerah memerlukan aktor lain seperti Komunitas Masyarakat Lokal, Media serta Akademisi untuk menyukseskan agenda serta kepentingan yang tertuang dalam program-program pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemerintah untuk melakukan tupoksinya sendiri sehingga perlu melibatkan orang lain dan bertukar sumberdaya dengan aktor lainnya. Tak hanya itu, BP Geopark Maros-Pangkep sebagai struktur kordinasi Disbudpar Sulsel yang berwenang dalam pengelolaan Geopark Maros-Pangkep juga melakukan pertukaran sumberdaya khususnya pada konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi dengan aktor yang terlibat di jaringan. Pemerintah Desa Salenrang sebagai aktor pelaksana kebijakan di sektor desa juga melakukan kordinasi bersama pemerintah daerah setempat untuk menjalankan program-program pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Pemerintah daerah juga memiliki aktor katalisator yaitu DPRD Sulsel sebagai wadah jaringan yang berkaitan pada perumusan peraturan daerah untuk produk hukum sebagai legalitas pengelolaan serta perlindungan KEE Maros-Pangkep dimana DPRD Sulsel saat perumusan perda ini menerima semua aktor secara setara tanpa melihat latarbelakang dari aktor terkait.

Dalam pengembangan *ecotourism* aktor pemerintah bukan aktor yang memiliki peran tunggal dan sentral dalam jaringan, aktor seperti komunitas masyarakat lokal yang terafiliasi oleh pemerintah daerah maupun tidak seperti POKDARWIS dan Komunitas Anak Sungai sangat berperan dalam pengelolaan pariwisata di Rammang-Rammang. Hal ini didasari karena unsur utama dalam menjalankan kepariwisataan di Rammang-Rammang dalam konteks desa wisata hingga cakupan wilayah UNESCO Global Geopark adalah pelibatan masyarakat lokal untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya yang terdapat dalam wilayah tersebut. POKDARWIS Rammang-Rammang sendiri secara kelembagaan dikukuhkan melalui keputusan bupati dan keputusan kepala desa sehingga menjadi tanggung jawab secara hirarkis dalam implementasi penyelenggaraan kepariwisataan yang berhubungan dengan atraksi, akses maupun aminitas di Rammang-Rammang untuk melayani wisatawan yang berkunjung. Sedangkan Komunitas Anak Sungai sendiri walaupun tidak terlegitimasi secara administratif formal dalam menjalankan pengelolaan pariwisata di Rammang-Rammang, *bargain position* sebagai penjaga karst melalui kegiatan pelibatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui gagasan tanding yang dilakukan dalam mengupayakan agar lingkungan tetap lestari dan tetap bisa memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di Rammang-Rammang. Keduanya secara koordinasi lintas sektor berbeda namun pada hilir implementasi pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang mereka secara tidak langsung melakukan *resources sharing* antar aktor.

Media serta akademisi juga punya posisi yang penting dalam mengedukasi dengan basis ilmiah dan pemberitaan faktual untuk menyalurkan informasi kepada

seluruh aktor tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rammang-Rammang khususnya dalam melakukan pengembangan *ecotourism*. Akademisi berperan sebagai *formal advisor* yang memberikan pertimbangan saat pengambilan keputusan dan kebijakan berdasarkan riset serta kajian ilmiah berupa naskah akademik maupun hasil penelitian yang akan menjadi landasan untuk bertindak. Sedangkan media berfungsi untuk memberitakan serta menjadi perpanjangan tangan atas sosialisasi dan edukasi yang hendak disampaikan oleh para aktor dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang baik skala kecil maupun luas.

Hubungan kekuasaan yang diartikan sebagai pertukaran informasi dan sumberdaya oleh para aktor diidentifikasi telah dilakukan dalam jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Pertukaran sumberdaya yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar telah dilakukan oleh para aktor walaupun secara tersurat seringkali terdapat resistensi antara aktor yang terlibat di jaringan. Walau demikian, pertukaran informasi yang ditandai intensitas serta arah komunikasi masih belum dijalankan secara optimal bagi para aktor dan ini menjadi catatan penting dalam proses *resource sharing* karena komunikasi dilakukan tidak hanya pada saat ada kepentingan dari para aktor namun dilakukan secara berkala baik secara formal maupun non formal. Akibat komunikasi yang belum berjalan optimal tersebut ditandai masih adanya resistensi dan konflik kepentingan antar aktor dalam jaringan. Situasi ini tentu akan berdampak kurang baik dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang utamanya dalam menghadapi penilaian dan asesmen yang dilakukan atas kepentingan tertentu yang bersifat krusial seperti revalidasi UGG dan sebagainya.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa aktor seperti pemerintah memiliki kecenderungan dalam melakukan sentralisasi saat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang dan kurang merangkul serta menghubungkan para aktor lainnya dalam pengelolaan tersebut khususnya sebagai representasi konsep pengembangan yang dilakukan berupa penanganan dan pengelolaan kepariwisataan diberikan kepada masyarakat lokal untuk dikembangkan secara fungsional sebagai peran dan fungsi aktor. Hubungan kekuasaan yang dilakukan berupa pertukaran sumberdaya sebenarnya sudah terjadi dalam jaringan namun belum optimal dilakukan karena masing-masing aktor sebenarnya masih mengedepankan kewenangan serta kepentingannya tanpa mempertimbangkan aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan didasari oleh komunikasi yang belum terarah dengan baik karna hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu jika hanya merasa diperlukan. Akibatnya, pengembangan *ecotourism* berlangsung sesuai keinginan masing-masing yang berujung pertentangan konsep pelaksanaan antar aktor. Walau demikian, karna pertukaran sumberdaya sebenarnya sudah terjadi proses pengembangan *ecotourism* sudah dilakukan namun perlu perbaikan secara berkala khususnya di ranah komunikasi antar aktor.

3.7 Strategi Aktor (*Actor Strategies*)

Pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki aktor lain dalam jaringan untuk mewujudkan kepentingan dari aktor yang terkait merupakan pemaknaan dari strategi aktor. Pada jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Rammang-Rammang, para aktor memiliki strateginya sendiri untuk mencapai kepentingannya. Kepentingan pemerintah daerah dalam jaringan ini yaitu bagaimana program-program yang direncanakan dalam regulasi serta kebijakan bisa diimplementasikan secara optimal yang kemudian hasilnya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan terlindunginya alam serta lingkungan baik di Rammang-Rammang secara lokus utama maupun UGG dalam cakupan yang lebih universal. Kepentingan ini dilakukan dengan pelibatan berbagai aktor dalam implementasinya baik secara perencanaan maupun teknis pelaksanaan melalui pembentukan Pokja dan perumusan aturan-aturan yang mengikat dalam mewujudkan misi dari pemerintah daerah dalam hal ini pengembangan *ecotourism*. Kordinasi juga tetap dilakukan oleh aktor horizontal seperti media, komunitas masyarakat serta akademisi untuk optimalnya strategi yang disusun untuk bisa memberikan sumberdaya masing-masing demi kelancaran kewenangan pemerintah daerah sendiri.

Pada dasarnya, strategi yang dimiliki para aktor dalam jaringan implementasi kebijakan pengembangan *ecotourism* relatif sama dalam upaya pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Yang berbeda adalah cara pelaksanaan dari masing-masing aktor untuk memberikan sumberdaya kepada tujuan utama dari tiap aktor berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam tujuan ini, strategi aktor dalam memenuhi indikator utama dalam pelaksanaan *ecotourism* telah mencapai tujuan sehingga bisa dikatakan masih dalam tahapan pengoptimalan. Ini didasari karena *roadmap* serta *masterplan* yang disusun beberapa waktu yang lalu baru dirampungkan sehingga memerlukan waktu untuk dijalankan. Oleh karena itu, strategi aktor ini sudah bisa dikatakan berjalan dengan optimal karena memperlihatkan hasil yang signifikan dilihat dari atensi serta perhatian khusus yang diberikan ke Rammang-Rammang dalam peningkatan kualitas kepariwisataan yang terjadi.

Strategi aktor dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang sebenarnya telah tercapai jika ditinjau atas data peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang ditinjau atas berkurangnya pengerukan ekosistem karst secara ekstraktif namun untuk mencapai tujuan *ecotourism* yang lebih progresif dan berkembang diperlukan alur komunikasi yang jelas untuk para aktor yang terlibat dalam jaringan sehingga dapat memaksimalkan kontribusi sumberdaya yang dimiliki masing-masing. Ini sangat penting dilakukan berhubung para aktor yang terlibat memiliki peran, fungsi serta sumberdaya yang bervariasi sehingga mengharuskan koordinasi dan kerjasama bisa lebih tercipta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa jaringan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan jaringan kebijakan yang ada menurut pandangan (Van Waarden, 1992). Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diajukan dari hasil penelitian serta pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aktor yang terlibat dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang meliputi aktor dari pemerintah daerah, komunitas masyarakat lokal, akademisi, media dan badan usaha. Keterlibatan jumlah aktor menunjukkan keseimbangan, khususnya aktor pemerintah daerah, akademisi dan media. Keterlibatan badan usaha karena terafiliasi oleh pemerintah desa sebagai BUMDES walaupun keterlibatannya sempit namun telah menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya. Ini juga terjadi pada komunitas masyarakat lokal yaitu Komunitas Anak Sungai yang perlu diperluas pelibatangannya.
2. Pada dimensi fungsi jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang, setiap aktor telah memiliki peran masing-masing dan telah terjadi pertukaran informasi antar aktor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan sebagai indikator utama dalam mengembangkan *ecotourism*. Namun, pertukaran informasi dan sumberdaya dalam mencapai tujuan bersama harus dilakukan pengoptimalan berkala karena masih kurangnya pelibatan dalam kerjasama yang jelas antar aktor dalam kolaborasi maupun kemitraan.
3. Struktur yang ada tidak diartikan sebagai alur kerja. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya mekanisme penghubung antar aktor dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang.
4. Pelembagaan dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* telah tertuang melalui Perbub Nomor 774/KPTS/556/IV/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Geopark Maros-Pangkep Kabupaten Maros Tahun 2022. Namun, pelembagaan ini tidak mengatur secara jelas mengenai kerjasama antar aktor terlebih yang tidak disebutkan dalam kelompok kerja tersebut walau seharusnya dilibatkan.
5. Dimensi Aturan Bertindak pada jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini karena masih ada resistensi dalam ranah menjalankan peran masing-masing di jaringan aktor walaupun pada dasarnya bersepakat walau di ranah prinsip-prinsip dasar.
6. Hubungan Kekuasaan sudah terjadi di beberapa aktor yang terlibat namun kewenangan serta otoritas belum terdistribusi dengan optimal.

7. Strategi Aktor dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* melalui komunikasi informal dan formal dengan aktor lain untuk mencapai tujuannya. Para aktor dinilai telah optimal dalam pemanfaatan sumberdaya serta informasi masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan di bab sebelumnya, saran yang bisa peneliti sampaikan dalam jaringan kebijakan pengembangan *ecotourism* kawasan karst rammang-rammang di Kabupaten Maros sebagai berikut:

1. Keterlibatan aktor harus bersifat luas dan mengkanalisasi aktor yang terlibat hanya melihat kesepemahaman, perlunya perluasan pada aktor yang notabene memiliki resistensi terhadap *leading sector* yaitu pemerintah untuk dirangkul karna memiliki *bargaining position* yang cukup strategis dalam pengembangan *ecotourism* di Rammang-Rammang. Pembentukan pokja sudah dilakukan untuk pengelolaan kawasan Geopark Maros-Pangkep yang didalamnya terdapat kawasan Rammang-Rammang diharapkan memenuhi tupoksi yang telah di atur dan tidak menjadi formalitas semata.
2. Menyusun *Roadmap* dan *Masterplan* yang jelas serta tersosialisasi baik ke semua aktor dalam pengelolaan kepariwisataan di Rammang-Rammang dalam upaya pengembangan *ecotourism* di wilayah tersebut. Dalam hal ini pula mengharuskan adanya wadah/forum komunikasi antar aktor dalam jaringan yang bersifat horizontal terhadap semua aktor sehingga penyampaian informasi bisa optimal karena permasalahan terbanyak yang dihadapi adalah dinamika yang tercipta karna kurangnya komunikasi antar aktor.
3. Pelembagaan harus diciptakan dengan asas kejelasan sehingga tidak tercipta ketidakteraturan dalam pelaksanaan peran dan fungsi para aktor yang terlibat. Pelembagaan tidak harus dalam MoU melainkan kesepakatan sosial yang terjalin atas komunikasi dan komitmen bersama walaupun pada akhirnya akan bermuara kembali pada penyusunan MoU sebagai landasan formal demi terciptanya kolaborasi dan kerjasama yang optimal untuk pengembangan program baik yang direncanakan maupun telah terimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi. (2018). Kolaborasi dan kinerja kebijakan (Tantangan dan strategi dalam penentuan dan implementasi kebijakan) (M. Irvan, Ed.). Kedai Buku Jenny.
- Alwi. (2022). Governance dan Kebijakan Publik (B. Sabrang, Ed.; Vol. 1). UPT UNHAS PRESS.
- Alwi, & Kasmad, R. (2014). BUREAUCRATIC SYSTEM VS PEOPLE EMPOWERMENT POLICY:EMPIRICAL EVIDENCE FROM COCOA FARMER EMPOWERMENT POLICY IN SOUTH SULAWESI PROVINCE, INDONESIA. *Humanities and Social Sciences Review*.
- Badan Pusat Statistik Kab. Maros. (2024). KABUPATEN MAROS DALAM ANGKA MAROS REGENCY IN FIGURES 2024.
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Deleon, P., & Varda, D. M. (2009). Toward a Theory of Collaborative Policy Networks: Identifying Structural Tendencies.
- DeSeve, G. E. (2007). Creating managed networks as a response to societal challenges. *The Business of Government Magazine*.
- Dewi, K. I., Suwarti, & Yuwanti, S. (2021). PENGENALAN KONSEP EKOWISATA DAN IDENTIFIKASI POTENSI WISATA ALAM BERBASIS EKOWISATA.
- Diaz, O. N., Lopez, C. M., Axelrod, M., & Norris, P. (2022). Decentralizing the Governance of Inland Fisheries in the Pacific Region of Colombia. *International Journal of the Commons*, 16(1), 78–93. <https://doi.org/10.2307/48712055>
- Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (A. Dwiyanto, Ed.). Gadjah Mada University Press.
- Frasawi, E. S. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3). <https://doi.org/10.23887/jjpg.v6i3.20704>
- Hajramurni, A., Rusdianto, E., Tadjudin, M., Ambari, M., Nurbaya, Wardyah, N. S., Gaffar, N. F., Riadi, S., Mappong, S., & Chandra, W. (2022). Merawat Rammang-Rammang: Upaya Selamatkan Ekosistem Karst Unik Sulawesi, Sebuah Kompilasi Tulisan Jurnalis Lingkungan tentang Ekologi, Sejarah, dan Sosial Budaya Masyarakat.
- Hartina, Alwi, & Susanti, G. (2020). Trust in the Network of Food Diversification Policy Implementation in Bone Regency. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 6(2).
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2006). *Informal Institution and Democracy : Lessons from Latin America*. JHU Press.
- Hidayat, A. R., Alwi, A., & Susanti, G. (2015). Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba).
- Hidayat, R. A., Alwi, & Susanti, G. (2015). Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 1(2).
- Ikhsan, M. (2021). PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN KARST RAMMANG-RAMMANG KABUPATEN MAROS.

- Jun, S. S. (2006). *The Social Construction of Public Administration: Interpretive and Critical Perspectives* (S. S. Jun, Ed.). State University of New York Press.
- Kasmadi, R., & Alwi, A. (2015). Democratic Model of Public Policy Accountability. Case Study on Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City. *Journal Of Government and Politics*, 6(2), 186–202. <https://doi.org/10.18196/jgp.2015.0014>
- Klijn, E.-H., Koppenjan, J. F. M., Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2000). Public Management and Policy Networks: The Theoretical Foundation of the Network Approach to Governance 135-158) (issn 1461-667X). In *Public Management* (Vol. 2, Issue 2).
- Klijn, H. E., & Koppenjan, J. (2016). *Governance Networks in the Public Sector* (Vol. 1). Routledge.
- Larson, A. M., & Soto, F. (2008). Decentralization of natural resource governance regimes. *Annual Review of Environment and Resources*, 33, 213–239. <https://doi.org/10.1146/annurev.enviro.33.020607.095522>
- Made, S., Benyamin, M., & Hatta, D. (2017). Tourism development strategies of Rammang-Rammang area as an ecotourism object. In *The Business and Management Review* (Vol. 9). ABRM.
- Marco, R., Leonardus, M., Rengkung, R., Rori, Y. P. I., & Timban, J. F. J. (2015). PERANAN EKOWISATA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BAHOI KECAMATAN LIKUPANG BARAT (Vol. 11).
- Moran, M., Martin, R., Goodin, & E, R. (2006). *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press Inc.
- Nugroho, P., & Yusuf, M. (2013). Strategi Pengembangan Ekowisata di Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Pasca Tsunami. In *Journal Of Marine Research* (Vol. 2, Issue 2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jmr>
- Putra, M. R. A., Iswara, A. R. P., Fasya, M. N., & Furqan, A. (2023). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kampung Wisata Karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 789–808. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2625>
- Rahman, A. (2022). The Contribution of the Tourism Sector to the Regional Original Income of Maros Regency as a Favorite Tourism Destination. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(2), 38–048. <https://doi.org/10.47616/jamrems.v3i3.328>
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosiologi Modern* (G. Ritzer, Ed.). Kencana Prenada.
- Rulinawaty. (2020). *Resources Sharing: Aktor Publik, Jaringan Kebijakan dan Perubahan Kebijakan* (Andriyansah, Ed.). Penerbit Leppi.
- Satria, D. (2009). STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI LOKAL DALAM RANGKA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI WILAYAH KABUPATEN MALANG. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 37–47.
- Saunders, F. P. (2014). The promise of common pool resource theory and the reality of commons projects. In *Source: International Journal of the Commons* (Vol. 8, Issue 2). <https://www.jstor.org/stable/26523180?seq=1&cid=pdf->
- Sirimorok, N., Fisher, M. R., Verheijen, B., & Sahide, M. A. K. (2023). Placing the Commoning First: Getting Beyond the Patronage Trap in Natural Resource Decentralization Policies. *Forest and Society*, 7(2), 412–434. <https://doi.org/10.24259/fs.v7i2.25926>
- Sopia Rukmana, N. S., Alwi, & Susanti, G. (2020). Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency.

Van Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. In *European Journal of Political Research* (Vol. 21).

Wuleka Kuuder, C.-J., & Kuuder, I. (2012). Community-Based Ecotourism and Livelihood Enhancement in Sirigu, Ghana. In *International Journal of Humanities and Social Science* (Vol. 2, Issue 18). <https://www.researchgate.net/publication/281271152>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep

Perda No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Kabupaten Maros Tahun 2022-2025 dan Perda No 2 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata

SK Gubernur Sulawesi Selatan No 1220 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan

Pengelola Taman Bumi/Geopark Nasional Maros Pangkep

Perbub Nomor 774/KPTS/556/IV/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Geopark Maros-Pangkep Kabupaten Maros Tahun 2022

Perdes Salenrang No 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Rammang-

Rammang

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



Data Pribadi

Nama Lengkap : A. Fauzan Sabir Siradj Munir A
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 12 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jl. Biring Romang Blok 1 No 2 Perumnas
Antang, Makassar
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Riwayat Pendidikan

- 2017-2020 : SMAN 12 Makassar
- 2020-2024 : S1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Pengalaman Pekerjaan dan Magang

- MBKM MSIB IV sebagai CSR Videografer di PT Surya Citra Media Tbk
- MBKM MSIB V sebagai General Affair (Shipping) di Samudera Indonesia
- Direktur di CV Sekawan Kreatif Indonesia
- Fotografer H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T. di Tim ANDALAN Hati for SULSEL 2024-2029
- Fotografer di PK Identitas 2021-2022
- Junior Researcher di Public Policy Network POLINET

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan





Lampiran 3 Logbook Penelitian

No	Tanggal/Bulan/Tahun Kegiatan	Kegiatan	Hasil
1.	8 April 2024	Konsultasi masalah penelitian dengan dosen pembimbing	Diarahkan untuk menyusun instrumen penelitian dan administratif sebelum melakukan penelitian
2.	13 April 2024	Pengajuan rencana judul penelitian dengan dosen pembimbing	Judul penelitian diterima dengan arahan perbaikan kata dan diarahkan membuat proposal penelitian
3.	14-23 April 2024	Observasi awal, pembuatan proposal penelitian dan pedoman wawancara	Seminar proposal penelitian dan pedoman wawancara
4.	24 April – 1 Juli 2024	Literature Review, penyusunan revisi proposal dan pedoman wawancara, konsultasi penelitian	Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk melengkapi administratif dan kerangka penelitian
5.	7 – 8 Juli 2024	Pengurusan surat izin penelitian dan rekomendasi penelitian dari kampus dan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan	Surat izin dari kampus dan rekomendasi penelitian dari DPMPTSP Sulawesi Selatan
6.	9 – 14 Juli 2024	Pengurusan surat izin penelitian di DPMPTSP Kabupaten Maros	Surat izin penelitian di DPMPTSP Kabupaten Maros
7.	15-17 Juli 2024	Pemetaan informan dan persiapan wawancara	Urutan wawancara informan
8.	18 Juli 2024	Wawancara dengan Pemerintah Daerah (Anggota DPRD Sulawesi Selatan – Wakil Ketua Pansus	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan – Wakil Ketua

		Ranperda No 3 Tahun 2019)	<p>Pansus Ranperda No 3 Tahun 2019</p> <p>Sebagai aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan, DPRD terlibat aktif berperan sebagai katalisator daripada aktor yang ada di dalam jaringan kebijakan khususnya terkait pengembangan <i>ecotourism</i> di Rammang-Rammang.</p>
9.	19 Juli 2024	Wawancara dengan Pemerintah Daerah (Kepala Bidang Pariwisata, Disparpora Kab. Maros)	<p>Kepala Bidang Pariwisata, Disparpora Kab. Maros</p> <p>Sebagai aktor kunci yang terlibat dalam implementasi kebijakan terkait pengembangan <i>ecotourism</i> di Rammang-Rammang, Disparpora Maros punya posisi penting secara formal dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan dan pengembangan secara formil dan peraturan yang berlaku di daerah kawasan UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep.</p>

10.	20 Juli 2024	Wawancara dengan POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang dan Pemerintah Desa Salenrang Kab. Maros (BUMDES Appakabaji)	<p>BUMDES Appakabaji</p> <p>Sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan khususnya penanggung jawab retribusi pariwisata di wilayah ekowisata Rammang-Rammang, BUMDES Appakabaji juga sebagai representasi pemerintah desa dalam otoritas pengambilan keputusan di ranah otoritas desa.</p> <p>POKDARWIS Hutan Batu Rammang-Rammang</p> <p>Sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam pendampingan dan pelibatan masyarakat lokal, penyedia unsur kepariwisataan dan wadah aspirasi masyarakat, POKDARWIS memiliki peran dalam otoritas informasi serta pelaksana layanan kepariwisataan di wilayah Rammang-Rammang.</p>
11.	24 Juli 2024	Wawancara dengan Mongabay.id dan BP	<p>Mongabay.id</p> <p>Sebagai aktor yang memiliki peran</p>

		Geopark Maros-Pangkep	<p>dalam penyebaran informasi dan edukasi baik secara luas maupun antar aktor yang berada dalam jaringan khususnya pada kebijakan pengembangan <i>ecotourism</i> di Rammang-Rammang.</p> <p>Disbudpar Sulsel – BP Geopark Maros-Pangkep</p> <p>Sebagai aktor yang menjadi penanggung jawab atas pengawasan wilayah Geopark Maros-Pangkep yang kemudian secara spesifik menjadi UNESCO Global Geopark. Memiliki otoritas edukasi dan kontrol dalam jaringan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pertimbangan atas pengelolaan kawasan UGG.</p>
12.	29-30 Juli 2024	Wawancara dengan Komunitas Anak Sungai (<i>Local Communities/Local Champions</i>)	<p>Komunitas Anak Sungai</p> <p>Sebagai aktor yang menjadi wadah aspirasi masyarakat</p>

			<p>lokal dalam mengelola sumberdaya dan kepariwisataan di Rammang-Rammang melalui konsep <i>Communities Based Tourism</i>. Pelaksana kebijakan atas pranata lokal melalui kesepakatan sosial di masyarakat setempat.</p>
13.	2 Agustus 2024	Wawancara dengan Dosen/Peneliti Fakultas Kehutanan UNHAS	<p>Dosen & Peneliti Fakultas Kehutanan</p> <p>Sebagai aktor yang berperan dalam melakukan riset serta pertimbangan ilmiah pada aktor yang ada dalam jaringan kebijakan. Melaksanakan edukasi serta penasehat secara formal maupun non formal kepada institusi maupun masyarakat yang terlibat dalam pengembangan <i>ecotourism</i> sebagai alternatif solusi pemecahan masalah yang terjadi.</p>
14.	3 - 7 Agustus 2024	Penyusunan Skripsi	Draft selesai disusun
15.	8 Agustus 2024	Penyerahan draft skripsi dan konsultasi ke dosen pendamping	Draft diberikan kepada dosen pembimbing untuk diberikan saran dan tanggapan

16.	15 – 16 Agustus 2024	Konsultasi dengan dosen pembimbing, perbaikan revisi dosen pembimbing	Diarahkan untuk memberi hasil analisis berdasarkan teori yang digunakan yaitu sesuai dengan Van Waarden (1992). Revisi diselesaikan
17.	15 Agustus 2024	Skripsi sudah dapat disidangkan	Pengurusan jadwal sidang

Lampiran 4 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 5494/UN4.8.1/PT.01.04/2024 03 JULI 2024
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Pengambilan Data dan Wawancara

Yth. . Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPPMD Prov. Sulsel
Makassar.

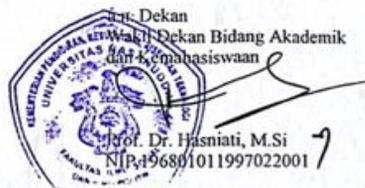
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

Nama : A. Fauzan Sabir Siradj Munir A
No. Pokok : E011 20 1060
Departemen : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat : Jln. Biring Romang Blok 1 no 2. Perumnas Antang

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepuustakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Jaringan Kebijakan Pengembangan Ecotourism Kawasan Karst Rammang-Rammang di Kabupaten Maros

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 19415/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 5484/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A
Nomor Pokok	: E011201060
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" JARINGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ECOTOURISM KAWASAN KARST RAMMANG-
RAMMANG DI KABUPATEN MAROS "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **22 Juli s/d 22 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
 Gedung Mulo Jl. Jend. Sudirman No.23 Telp. (0411) 878912 Fax. 872314, Makassar 90133
 Website : disbudpar.sulselprov.go.id e-mail : disbudpar@sulselprov.go.id

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

No. 423.6 / 4023 / Budpar

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 19415/S.01/PTPS/2024 tanggal 22 Juli 2024 Perihal Izin Penelitian, yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Firdausi Topuriti., S.E., M.M
N I P : 197008031989031001
Pangkat : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan Prov. SulSel
Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi SulSel
Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

1. **Nama** : A.FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A
Nomor Pokok : E011201060
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa (S1)
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Alamat : JLP.Kemerdekaan Km.10 Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian dan telah selesai melakukan penelitian dengan judul "JARINGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ECOTOURISM KAWASAN KARST RAMMANG-RAMMANG DI KABUPATEN MAROS" yang di laksanakan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Juli 2024

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

 Firdausi Topuriti., S.E., M.M
 Penata Tk.I / III.d
 NIP 197008031989031001



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kantor Bupati Kabupaten Maros
 Provinsi Sulawesi Selatan Telp./Fax (0411) 371102 KodePos 59516 Email
pariwisata@maroskab.go.id website: www.maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada ;

Nama : **A. FAUZAN SABIR SIRADJ MUNIR A**
 NIM : E011201060
 TTL : Makassar, 12 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 No HP/Email : 082193179659/andifauzan156@gmail.com

Bahwa benar yang bersangkutan melakukan penelitian terkait segala hal yang berhubungan dengan Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Maros. Penelitian difokuskan pada Bidang Pariwisata sebagai leading sektor pengembangan Kepariwisataan dengan kualifikasi utama penelitian terkait ecowisata utamanya di salah satu tujuan wisata andalan Kabupaten Maros yaitu di Rammang-Rammang.

Penelitian ini dimulai pada Tanggal 10 Juli 2024 dan berakhir pada Tanggal 10 Agustus 2024. Dan kegiatan penelitian ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga (DISPARPORA) Kab. Maros, serta segenap stakeholder yang terkait baik perangkat Desa, Pencinta Alam dan Pokdarwis setempat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai bahan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 12 Agustus 2024
 Kepala Bidang Pariwisata

SAHMATIAH S.F. M.Adm.Pemb
 Pangkat: Pembina
 Nip: 196911032007012024